

**PERANAN MODAL ASING DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERIODE 1967 - 1988**



Universitas	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tanggal	11 April 1992
Fakultas	Fak. Ekonomi
Jumlah	1 Ekp.
Uraian	Hadiah
Nomor	92 16 04 0620
Penyedia	SKR. E. 92 HAS. P.

OLEH

HASANUDDIN

No. Mahasiswa ; 85 01 103

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1992

**PERANAN MODAL ASING DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERIODE 1967 - 1988**

O L B H

HASANUDDIN

No. Mahasiswa ; 85 01 103

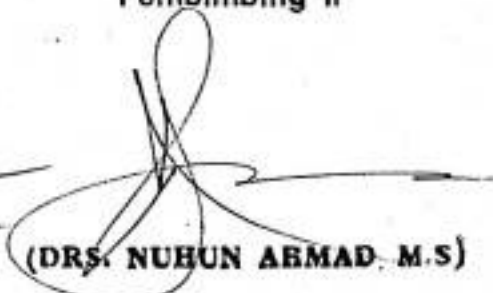
Skripsi Sarjana Lengkap untuk memenuhi
sebagian syarat-syarat guna mencapai
gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


(DR. A. RACHMAN PANETTO, MA)


(DRS. NUHUN ARMAD, M.S)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kehadirat Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan pula salah satu tugas keilmuan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan sehingga bentuk dan isi dari tulisan ini masih jauh kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai suatu karya yang bersifat ilmiah. Namun, inilah hasil maksimal yang dapat penulis persembahkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang bertujuan menyempurnakan skripsi ini, penulis sangat harapkan dengan kerendahan hati.

Di samping itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada : ..

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak putus-putusnya, sehingga penulis mampu menjalani jenjang pendidikan dari awal sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Demikian pula pada saudara-saudaraku

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kehadirat Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan pula salah satu tugas keilmuan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan sehingga bentuk dan isi dari tulisan ini masih jauh kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai suatu karya yang bersifat ilmiah. Namun, inilah hasil maksimal yang dapat penulis persembahkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang bertujuan menyempurnakan skripsi ini, penulis sangat harapkan dengan kerendahan hati.

Di samping itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan pengorbanan yang tidak putus-putusnya, sehingga penulis mampu menjalani jenjang pendidikan dari awal sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Demikian pula pada saudara-saudaraku

tercinta. Hanya doa dan bakti yang dapat penulis persembahkan kepadanya atas segala pengorbanannya.

2. Bapak DR. A. Rachman Panetto, M.A. dan Bapak Drs Nuhün Ahmad, M.S., masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II. Atas kerelaan dan keihlasannya yang tanpa pamrih dalam membimbing dan menasehati serta memberikan kesempatan kepada penulis ditengah-tengah kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak DR. H.A. Karim Saleh, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. R.A. Wattimena dan Bapak P. Hamrie, masing-masing sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan dan seluruh staff Kantor Biro Pusat Statistik Ujung Pandang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
6. Kepada seluruh rekan utamanya Zainal Callo, SE., Cecep Herda Prabowo, Herlina Rampalodji, Rosnaeni Palureng, SE., Drs. Mahluddin, Syafriadi Tajang, SE serta rekan-rakan lainnya yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses studi maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon kehadiran Allah S.W.T., kepada mereka yang membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini, semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Dan semoga penulis tetap diteguhkan iman untuk berkemampuan dalam mengembangkan amanah keilmuan ini.

Amin !.

Ujung Pandang, Juli 1991

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Pertimbangan Obyektif dan Subyektif	1
1.1.2. Rumusan Masalah	5
1.1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..	5
1.1.3.1. Tujuan	5
1.1.3.2. Kegunaan	5
1.2. Landasan Teoritik	6
1.2.1. Kerangka Konseptual dan Tinjauan Pustaka	6
1.2.2. Kerangka Analisis	10
BAB II. METODOLOGI	13
2.1. Hipotesis	13
2.2. Model Analisis	13
2.3. Pembatasan Variabel Operasional	16
2.4. Rancangan Penelitian	17
2.4.1. Daerah Penelitian	17
2.4.2. Prosedur Pengumpulan Data	17
2.4.3. Tata Urut Isi Laporan	17

BAB III. BAHASAN TEORI	19
3.1. Arti Penting Modal Asing	19
3.2. Jenis-Jenis Investasi	25
3.3. Bantuan Bersyarat dan Bantuan tidak Bersyarat	27
3.3.1. Bantuan Bersyarat	27
3.3.2. Bantuan Tidak Bersyarat	30
3.4. Dua Jurang Model Bantuan Luar Negeri ...	32
3.5. Biaya dan Manfaat dari Bantuan	37
3.6. Penanaman Modal Asing Swasta	42
3.6.1. Kelebihan Investasi Langsung	42
3.6.2. Hambatan Pada Investasi Asing Swasta	45
3.6.3. Langkah-langkah Untuk Mendorong Investasi Asing Swasta	46
3.7. Penanaman Modal Asing Negara	50
3.7.1. Faktor-faktor yang Menentukan Jumlah Bantuan Luar Negeri Bagi Pembangunan Ekonomi	51
3.7.2. Bantuan atau Perdagangan	53
3.8. Pengaruh Bantuan atas Pertumbuhan Ekonomi	55
BAB IV. MODAL ASING DAN EKONOMI INDONESIA	60
4.1. Bantuan Luar Negeri	60
4.2. Penanaman Modal Asing (PMA)	74
4.3. Arus Masuk Modal Asing	82

4.4. Produk Domestik Bruto, Investasi dan Tabungan Domestik	95
4.5. Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ICOR Indonesia	101
BAB V. PERANAN MODAL ASING DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	110
5.1. Peranan Modal Asing Dalam Anggaran Belanja Negara	110
5.2. Peranan Modal Asing Dalam Pemupukan Investasi Domestik	114
5.3. Peranan Modsal Asing Dalam Pemupukan Tabungan Domestik	115
5.4. Peranan Modal Asing Dalam Pertumbuhan Ekonomi	117
BAB VI. P E N U T U P	122
6.1. Kesimpulan	122
6.2. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
IV - 1. Indonesia: Anggaran Pembangunan Negara dan Bantuan Luar Negeri	67
IV - 2. Indonesia: Alokasi Pengeluaran Pembangunan dan Bantuan Proyek Menurut Sektor	68
IV - 3. Persetujuan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dan Pelunasan Pinjaman	69
IV - 4. Indonesia: Pinjaman Luar Negeri Bruto dan Pinjaman Pemerintah/Dijamin Pemerintah	70
IV - 5. Indonesia: Pinjaman Jangka Panjang Pemerintah/Dijamin Pemerintah	73
IV - 6. Penanaman Modal Asing	78
IV - 7. Proyek-Proyek Penanaman Modal Asing menurut Sektor Ekonomi	80-81
IV - 8. Neraca Pembayaran Indonesia	84-85
IV - 9. Arus Masuk Modal Asing	86
IV - 10. Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri	89
IV - 11. Penggunaan Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri	90
IV - 12. Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri dan Pembayaran Kepada Pihak Luar Negeri	93
IV - 13. Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri dan Defisit Transaksi Sedang Berjalan	94

IV - 14. Kapasitas Impor Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri	96
IV - 15. Kapasitas Impor Pinjaman Bersih Yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Sektor Resmi Pemerintah..	97
IV - 16. Perkembangan Investasi Domestik	98
IV - 17. Perkembangan Tabungan Domestik	99
IV - 18. Pertumbuhan Angkatan Kerja Indonesia	100
IV - 19a. Pengangguran dan Angkatan Kerja	106
IV - 19b. Pengangguran Tak Kentara	107
IV - 20. Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ICOR Indonesia	108
IV - 21. Elastisitas Kesempatan Kerja, Distribusi dan Pertumbuhan PDB dan Kesempatan Kerja	109
V - 1. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	112
V - 2. Pengeluaran Pemerintah yang Dibiayai Pihak Luar Negeri	113

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
III - 1. Target Tingkat Pertumbuhan	34



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
I. Analisa Regresi Peranan Modal Asing dalam Pemupukan Investasi Domestik	127
II. Analisa Regresi Peranan Modal Asing dalam Pemupukan Tabungan Domestik	128
III. Analisa Regresi Peranan Modal Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi	129
IV. Tabel t	130
V. Tabel F (= 5 persen)	131
VI. Tabel F (= 1 persen)	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. *Pertimbangan Obyektif dan Subyektif*

Suatu negara yang sedang berkembang memerlukan dana yang sangat besar untuk pembiayaan pembangunan yang direncanakan demi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sementara sumber dana yang tersedia di dalam negeri pada negara sedang berkembang belum mencukupi sehingga mencari sumber dana alternatif yang bisa menutupi kekurangan dari dana yang dipatu. Sumber dana yang dimaksud tersebut adalah sumber dana eksternal yaitu bantuan luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi. Mereka menganggap bahwa modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Seperti juga halnya Indonesia, sejak dimulainya Orde Baru banyak mengadakan reformasi kebijaksanaan yang dapat menstabilkan dan merehabilitasi perekonomian. Karena Indonesia pada masa Orde Lama banyak mengalami guncangan, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Di mana di bidang ekonomi pada masa awal Orde Baru ditandai dengan adanya inflasi yang sangat tinggi yaitu 650 persen pada tahun 1966 dan pendapatan masyarakat rata-rata per kepala US \$ 80 per

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. *Pertimbangan Obyektif dan Subyektif*

Suatu negara yang sedang berkembang memerlukan dana yang sangat besar untuk pembiayaan pembangunan yang direncanakan demi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sementara sumber dana yang tersedia di dalam negeri pada negara sedang berkembang belum mencukupi sehingga mencari sumber dana alternatif yang bisa menutupi kekurangan dari dana yang diperlukan. Sumber dana yang dimaksud tersebut adalah sumber dana eksternal yaitu bantuan luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi. Mereka menganggap bahwa modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Seperti juga halnya Indonesia, sejak dimulainya Orde Baru banyak mengadakan reformasi kebijaksanaan yang dapat menstabilkan dan merehabilitasi perekonomian. Karena Indonesia pada masa Orde Lama banyak mengalami guncangan, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Di mana di bidang ekonomi pada masa awal Orde Baru ditandai dengan adanya inflasi yang sangat tinggi yaitu 650 persen pada tahun 1966 dan pendapatan masyarakat rata-rata per kepala US \$ 80 per

tahun, sedangkan luar negeri yang harus dibayar berjumlah US \$ 2,2 milyar.¹ Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah disamping mengandalkan sumber dalam negeri juga mengharapkan bantuan eksternal yang nantinya dapat membantu meringankan beban perekonomian Indonesia karena sumber dana dalam negeri tidak dapat menutupi anggaran belanja negara. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan-pendekatan pemerintah ke luar negeri, yaitu dengan maksud :

1. mengadakan rescheduling hutang-hutang lama;
2. mengusahakan bantuan-bantuan keuangan yang baru dari luar negeri untuk mendukung neraca pembayaran Indonesia;
3. berusaha menarik penanaman modal asing ke Indonesia.²

Sebagai realisasi pendekatan tersebut di atas antara lain diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) No. 1/1967 dan pemanggilan devisa yang dimiliki penduduk Indonesia yang lari dan bermukim di luar negeri melalui Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No.6/1966.

Sejak dikeluarkan undang-undang tersebut, maka arus modal asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan masa sebelumnya yaitu dari Pelita I sebesar Rp 779,5 milyar hingga Pelita IV mencapai Rp 13.475,4 milyar.

Hanya perlu digarisbawahi di sini bahwa sebetulnya modal asing baik bantuan luar negeri maupun penanaman modal

¹Zulkarnaen Djamin, Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita I, FE-UI, 1984, hal. 122

²Ibid, hal. 123

asing yang masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah jangan sampai menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Tetapi yang diutamakan adalah sumber-sumber dalam negeri yang berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Namun demikian, jumlah tabungan tersebut tidak dapat menutupi anggaran belanja negara setiap tahun, sehingga selalu ditutupi dengan pembiayaan pihak luar negeri. Dengan kata lain, bahwa modal asing yang masuk ke Indonesia hanya berupa pelengkap dan bukan yang utama. Dengan demikian, modal asing yang masuk ke Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang antara lain dikemukakan sebagai berikut :

"Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pengerahan dari dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.³

Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sangat menekankan pengerahan investasi yang bersumber dari dalam negeri yaitu berupa tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, devisa (hasil ekspor) dan jasa-jasa yang akhirnya dapat membiayai pembangunan yang diperlukan tiap tahun tanpa adanya bantuan luar negeri yang berperanan sebagai pelengkap dalam anggaran belanja

³Ketetapan MPR-RI. No. IV/MPR/1978, hal 18.

negara.

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut di atas tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa bantuan luar negeri tersebut dapat memberikan sumbangan secara kuantitatif yaitu telah mampu menjembatani antara persediaan tabungan dalam negeri dengan kebutuhan investasi untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tertentu.⁴ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini adalah berkat adanya bantuan dari pihak luar negeri yang berfungsi sebagai pelengkap atau menutupi sebagian dana investasi yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

Meskipun demikian, pengaruh modal asing terhadap perekonomian Indonesia harus diakui juga bahwa dorongan modal asing yang cukup besar itu belum tentu berhasil menciptakan perubahan secara kualitatif perekonomian Indonesia yaitu suatu ekonomi yang semakin mampu berkembang dengan kekuatan sendiri, tangguh terhadap guncangan-guncangan yang bersifat eksternal serta distribusi pendapatan yang makin baik. Dan hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas dalam skripsi ini mengenai peranan modal asing dalam anggaran belanja negara, tabungan dan investasi domestik serta dalam pertumbuhan ekonomi dengan judul pembahasan adalah "PERANAN MODAL ASING DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA".

⁴Basri Hasanuddin, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi, Lepas, Ujung Pandang, 1986, hal. 60

1.1.2. *Rumusan Masalah*

Peranan modal asing dalam ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat yang ditandai dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan pembangunan dari pihak luar negeri, yaitu pada tahun anggaran 1986/1987 telah mencapai jumlah sebesar Rp 3.589,1 milyar. Dengan demikian yang menjadi masalah pokok di sini adalah sejauh mana peranan modal asing yang masuk ke Indonesia terhadap pembiayaan dalam anggaran belanja negara, investasi domestik, tabungan pemerintah dan laju pertumbuhan tenaga kerja.

1.1.3. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1.1.3.1. *T u j u a n*

1.1.3.1.1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan modal asing dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat posisinya dalam anggaran belanja negara.

1.1.3.1.2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan modal asing terhadap pembentukan investasi domestik dan tabungan domestik.

1.1.3.1.3. Untuk melihat pengaruhnya modal asing tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.1.3.2. *Kegunaan*

1.1.3.2.1. Agar nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang berkompeten di dalam pengambilan kebijaksanaan dalam hal penerimaan modal asing.

1.1.3.2.2. Agar dapat menjadi bahan perbandingan bagi mereka yang akan meneliti atau mempelajari permasalahan yang serupa di masa datang sebagai bahan informasi bagi yang memerlukannya.

1.2. Landasan Teoritik

1.2.1. *Kerangka Konseptual dan Tinjauan Pustaka*

Sejak tahun 1969 Indonesia mulai menerapkan pembangunannya dalam sistem perencanaan yang bertahap, yaitu dengan dimulainya pola pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam tiap REPELITA, mulai REPELITA I sampai sekarang memasuki REPELITA V dan direalisasikan dalam RAPEN yang diterapkan tiap tahun tahun. Di samping itu, juga memasukkan variabel modal asing dalam porsi ketergantungannya terhadap pembiayaan pembangunan sebesar 76,99 persen pada awal Pelita I dan mengalami penurunan sebesar 24,12 persen pada awal Pelita II.

Hal tersebut tentunya sangat menggembirakan karena ketergantungan bantuan luar negeri terhadap belanja pembangunan menurun. Dengan demikian peranan modal asing yang masuk masuk ke Indonesia sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam GBHN dan diusahakan agar distribusinya terhadap pembiayaan pembangunan yang rasional semakin menurun.

Akan tetapi, keadaan tersebut tidaklah berlangsung lama di mana rasio kontribusi modal asing terhadap belanja pembangunan mengalami peningkatan lagi sehingga menduduki 80,8 persen dari ketergantungan sumber pembiayaan bantuan

Iuar negeri pada akhir Pelita IV dengan tahun anggaran 1988/1989.⁵

Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita bahwa sampai sejauhmana pemerintah memperbesar hutang luar negeri ?. Dan tentunya pemerintah tidak ingin mengalami nasib seperti negara-negara penerima bantuan luar negeri lainnya yang tidak mendapat kepercayaan lagi sebagai pengelola bantuan yang baik dari negara-negara donor.

Seperti disebut di muka, bahwa peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar, pemikiran mereka sebagai berikut :

1. Sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan pembangunan.
3. Modal asing dapat berperanan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural.
4. Kebutuhan akan modal asing akan menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

Studi empiris mengenai dampak modal asing terhadap pertumbuhan umumnya difokuskan dengan mengestimasi fungsi produksi Neo-Klasik, yang menggambarkan bagaimana pertumbuh-

⁵Mudrajad Kuncoro, "Dampak Arus Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan", *Prisma*, No. 9 th 1989, hal. 29.

an ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja. Faktor-faktor produksi ini selanjutnya dapat dipisahkan menurut asalnya, dalam negeri atau luar negeri. Dari hasil klasifikasi tersebut memberikan indikasi bahwa arus masuk modal asing telah menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang kawasan Asia dan Pasifik.

Asumsi dasar yang melatarbelakangi pemikiran tersebut adalah bahwa setiap satu dolar modal asing yang masuk akan mengakibatkan kenaikan satu dolar investasi. Dengan asumsi ini dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang stabil, dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing yang masuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Atau sebaliknya, dapat dihitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu.⁶

Namun demikian, banyak ahli ekonomi berkesimpulan bahwa hanya sebagian kecil modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara sebagian besar digunakan untuk menambah konsumsi.

Para penganut teori ketergantungan agaknya sependapat dengan yang terakhir ini. Samir Amin, Paul Baran, Cardoso, Gunder Frank, Prebisch, Dos Santos adalah nama-nama yang sering disebut sebagai pendukung utama teori ini.⁷

⁶Ibid, hal. 29.

⁷Sritua Arief dan Adi Sasono, Ketergantungan dan Keterbelakangan, LSP, Jakarta, 1984, hal. 90.

Hipotesa utama teori ketergantungan adalah (a). PMA dan bantuan luar negeri dalam jangka pendek memperbesar pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang menghambat pertumbuhan ekonomi; (b). makin banyak negara bergantung pada PMA dan bantuan luar negeri makin besar perbedaan penghasilan dan pada gilirannya pemerataan tidak tercapai.⁸

Lepas dari perbedaan visi dan hipotesa dari pendukung teori dependencia dan Neo-Klasik, ada beberapa catatan yang kiranya menarik untuk diperhatikan dalam setiap studi mengenai dampak modal asing yang masuk:

1. Studi-studi terdahulu umumnya tidak memasukkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan angkatan kerja.
2. Tidak berhasil menunjukkan hubungan dua arah antara tabungan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan efek yang ditimbulkan oleh arus masuk modal asing terhadap pemupukan tabungan domestik dan investasi domestik, yaitu jika jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat laju pertumbuhan ekonomi tertentu lebih besar dari jumlah tabungan yang dimobilisir di dalam negeri, maka perbedaan tersebut harus ditutupi dengan modal asing.

⁸Frans Kho Mariakasih, "Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan", Analisa, No. 9, 1982, hal. 793-804.

1.2.2. Kerangka Analisis

Kehadiran modal asing di negara sedang berkembang sangatlah erat hubungannya dengan masalah defisit neraca pembayaran yang mereka alami. Hal ini dapat dilihat pada komposisi ekspor negara sedang berkembang yang terdiri dari barang primer yang nilai tukarnya rendah. Sementara barang yang di impor adalah barang-barang modal yang nilai tukarnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan barang primer.

Sehingga dilihat dari adanya kesenjangan (gap) term of trade, maka negara sedang berkembang tersebut mengalami saving gap atau foreign exchange gap, dan bahkan juga dapat dialami gap keduanya sekaligus. Adapun gap yang pertama itu terjadi jika tabungan domestik yang dapat dimobilisir negara tersebut jauh lebih kecil dari jumlah pengeluaran investasi yang diperlukan guna dapat mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tertentu. Sedangkan gap yang kedua, terjadi jika nilai ekspor negara sedang berkembang jauh lebih kecil dari jumlah devisa yang diperlukan untuk mengejar suatu target pertumbuhan ekonomi tertentu. Sehingga dalam perekonomian terbuka sebahagian kekurangan devisa itu akan dapat ditutupi melalui pemasukan modal asing.⁹

Dari persamaan identitas, pendapatan nasional diketahui bahwa selisih antara pengeluaran investasi masyarakat dengan jumlah tabungan dalam negeri adalah sama dengan seli-

⁹Hendra Esmara, Memelihara Momentum Pembangunan, PT Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 291.



sih antara nilai impor dengan ekspor, dan sebagaimana juga diketahui bahwa pendapatan masyarakat itu digunakan untuk keperluan konsumsi (C), membeli barang dari luar negeri (M), dan juga untuk ditabung (S). Sehingga dalam persamaan identitas akan nampak sebagai berikut :

$$pendapatan \equiv konsumsi (C) + impor (M) + tabungan (S) \dots (1)$$

sedang permintaan masyarakat terhadap produksi nasional terdiri dari permintaan akan barang-barang konsumsi, barang-barang modal (I) dan permintaan luar negeri (X). Dalam persamaan identitas hal ini akan terlihat sebagai berikut :

$$produksi \equiv konsumsi (C) + ekspor (X) + investasi (I) \dots (2)$$

Selanjutnya, karena nilai dari pendapatan nasional itu adalah sama dengan nilai produksi nasional sehingga persamaan (1) dan (2) di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan identitas (3), yaitu sebagai berikut :

$$investasi (I) - tabungan (S) \equiv impor (M) - ekspor (X) \dots (3)$$

Dari persamaan identitas (3) di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selisih antara pengeluaran investasi yang dipergunakan untuk dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi tertentu dengan jumlah tabungan domestik adalah sama dengan perbedaan antara nilai impor dengan nilai ekspor.

Dengan demikian, jika terjadi salah satu gap atau kedua gap, maka untuk menutupinya adalah dengan jalan mencari alternatif lain untuk mendapatkan sumber dana yang dapat dimobilisir atau menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang

tertentu. Sehingga kehadiran modal asing di sini sangatlah penting untuk menutupi kekurangan sumber dana dalam negeri demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan negara tersebut.

BAB II

M E T O D O L O G I

2.1. H i p o t e s i s

Sebagaimana yang diutarakan lebih dahulu dalam pokok permasalahan tentang peranan modal asing yang masuk ke Indonesia terhadap anggaran belanja, tabungan dan investasi domestik serta pertumbuhan ekonomi, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut :

- 2.1.1. Diduga, bahwa modal asing yang masuk ke Indonesia mempunyai peranan positif dalam anggaran belanja.
- 2.1.2. Diduga, bahwa modal asing mempunyai peranan positif terhadap pemupukan tabungan dan investasi domestik.
- 2.1.3. Diduga pula, bahwa modal asing yang masuk ke Indonesia mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2. Model Analisis

Penelitian ini bersikap deskriptif, oleh karena itu akan dipergunakan analisa kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran sistematis tentang peranan modal asing yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, penulis mempergunakan bantuan peralatan berupa berupa perhitungan ekonometrika untuk membuktikan hipotesis mengenai peranan modal asing terhadap pemupukan tabungan domestik dan investasi domestik dipergunakan model regresi berganda sebagai berikut :

$$S = a + X_1Y + X_2F \dots\dots\dots (1)$$

$$I = a + X_1Y + X_2F \dots\dots\dots (2)$$

di mana, koefisien a menunjukkan bahwa sebelum variabel Y (PDB) dan F (Arus Masuk Modal Asing) berpengaruh terhadap S (Tabungan Domestik), maka nilai S yang ada sebesar a . Koefisien X_1 menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan dalam Y sedangkan F konstan, maka akan berpengaruh terhadap S sebesar X_1 dikalikan dengan kenaikan Y . Hal yang sama juga terjadi pada koefisien lainnya.

Untuk membuktikan hipotesis tentang peranan modal asing dan laju pertumbuhan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi akan dipergunakan rumus sebagai berikut :

$$RY = a + X_1 \frac{F}{Y} + X_2 LFR \dots\dots (3)$$

di mana, RY = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$\frac{F}{Y}$ = Rasio Arus Modal Asing dengan PDB

LFR = Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja

Simbol RY dalam persamaan (3) merupakan indikator umum perekonomian suatu negara, sehingga dapat mewakili perekonomian Indonesia.

Dasar pengambilan keputusan sebagai hasil pengujian hipotesis, maka digunakan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik tersebut adalah sebagai berikut :

01. Uji Statistik t

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individu pada ting-

kat signifikansi lima persen dan sepuluh persen. Jika nilai t observasi sama atau lebih besar dari pada nilai t tabel, maka hal tersebut dapat dikatakan signifikan.

2. Uji Statistik F

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel bebas secara keseluruhan dengan variabel terikat dengan menggunakan tingkat signifikan satu persen dan lima persen, maka dilakukan uji F . Variabel-variabel bebas tersebut dikatakan signifikan jika nilai F observasi sama atau lebih besar dari pada nilai F tabel.

3. Uji Statistik R^2

Untuk mengukur besarnya sumbangan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dipergunakan uji statistik R^2 . Semakin besar nilai R^2 ini, semakin besar pula pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Selain perhitungan tersebut di atas, maka juga dipergunakan perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dalam upaya menilai kemampuan daya serap investasi terhadap tenaga kerja di Indonesia.

Formula perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\sum_{i=1}^n IDB_i}{\sum_{i=1}^n PDB_i} \dots\dots\dots (4)$$

2.3. Pembatasan Variabel-Variabel Operasional

Dalam pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan definisi/batasan dari pada variabel-variabel yang digunakan dalam analisa selanjutnya, antara lain :

1. Anggaran belanja negara yang dimaksud dalam pembahasan lebih lanjut adalah semua bentuk penerimaan dalam negeri, pembiayaan pihak luar negeri, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
2. Tabungan domestik adalah tabungan yang berasal dari sektor pemerintah dan masyarakat. Dari sektor pemerintah yang dimaksud di sini adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih antara pengeluaran rutin dengan penerimaan dalam negeri. Sedangkan tabungan masyarakat adalah merupakan akumulasi dari tabanas, taska dan deposito berjangka.
3. Investasi domestik adalah investasi yang diperoleh dari dana yang dimobilisir di dalam negeri. Jika jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat laju pertumbuhan ekonomi tertentu lebih besar dari jumlah tabungan yang dapat dimobilisir di dalam negeri, maka perbedaan tersebut harus ditutupi dengan modal asing.
4. Modal asing yang dimaksud disini adalah modal yang diperoleh dari luar negeri baik berupa investasi langsung maupun tidak langsung yang masuk ke Indonesia.
5. Produk Domestik Bruto adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan secara keseluruhan dalam waktu tertentu tanpa

memperhitungkan orang yang bekerja di luar negara bersangkutan.

2.4. Rancangan Penelitian

2.4.1. Daerah Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih Bank Indonesia dan Kantor Statistik Cabang Ujung Pandang sebagai tempat penelitian utama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil data-data pada instansi lain dan berbagai perpustakaan di Ujung Pandang.

2.4.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui keterangan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2.4.3. Tata Urut Isi Laporan

Untuk kesempurnaan dalam urutan penulisan ini, maka penulis menguraikan secara sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang pandangan obyektif dari masalah yang dibahas dan pandangan subyektif penulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta landasan teoritik yang terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan kerangka analisis.

Bab Kedua mencakup metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, hipotesis, metode analisis, pembatasan variabel operasional, rancangan penelitian, prosedur pengumpulan data dan tata urutan isi laporan.

Bab Ketiga akan diuraikan mengenai bahasan teori yang terdiri dari arti penting modal asing, jenis-jenis investasi asing, bantuan bersyarat dan bantuan tidak bersyarat, dua jurang model bantuan luar negeri, biaya dan manfaat dari bantuan, Penanaman modal asing swasta dan penanaman modal asing pemerintah.

Bab Keempat merupakan bab analisis pembahasan yang meliputi uraian tentang arus masuk modal asing dan perkembangannya dalam Produk Domestik Bruto, investasi dan tabungan domestik, serta pertumbuhan ekonomi, investasi dan ICOR Indonesia.

Bab Kelima adalah juga bab analisis tentang peranan modal asing dalam perekonomian Indonesia terhadap anggaran belanja negara, pemupukan investasi dan tabungan domestik, serta peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Bab Keenam merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan judul pembahasan skripsi ini.

BAB III

BAHASAN TEORITIS

3.1. Arti Penting Modal Asing

Ciri negara terbelakang ialah kekurangan modal atau tingkat tabungan dan investasi yang rendah. Tidak hanya persediaan modal yang kecil tetapi juga laju pembentukan modal sangat rendah. Sebenarnya, dengan laju tabungan yang ada, mereka hampir tidak dapat menutupi penyusutan modal dan bahkan untuk mengganti peralatan modal yang ada. Usaha untuk memobilisasi tabungan domestik melalui perpajakan dan pinjaman masyarakat hampir tidak cukup untuk meningkatkan laju pertumbuhan modal yang ada melalui investasi. Malahan langkah tersebut menyebabkan merosotnya standar konsumsi, dan membuat rakyat semakin menderita. Impor modal asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah dan dengan demikian meningkatkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal.

Selain itu, tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal, dan bersama dengan itu negara terbelakang mengalami keterbelakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi terlihat pada biaya rata-rata produksi yang tinggi dan produktivitas buruh dan modal yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tenaga buruh yang tidak terampil dan usangnya peralatan modal. Yang terpenting, keterbelakangan itu terlihat pada ratio output modal yang tinggi yaitu untuk membuat satu unit output diperlukan modal yang lebih banyak.

Penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini mempercepat pembangunan ekonomi. Negara terbelakang sangat memerlukan kekurangan modal over-head ekonomi yang secara langsung diperlukan untuk lebih mempermudah investasi. Proyek jalan kereta api, jalan raya, kanal dan sumber tenaga merupakan infrastruktur yang diperlukan bagi pembangunan. Tetapi karena hal-hal tersebut memerlukan investasi modal yang sangat besar dan mempunyai masa persiapan yang panjang, negara-negara tersebut tidak akan mampu melaksanakannya tanpa bantuan modal asing.

Dengan batasan yang layak, bantuan keuangan luar negeri hanya menyangkut bagian tertentu dari arus masuk modal yang tidak berdasarkan rangsangan pasar normal, tetapi atas dasar kesepakatan berkonsesi. Maka yang disebut bantuan itulah yang dapat dikonversikan sebagai bantuan dalam nalarnya sepenuhnya; pinjaman hanya mengandung sebuah unsur dari bantuan; dan tidak termasuk investasi swasta asing dan pergerakan modal jangka pendek.¹

¹Ragnar Nurkse, Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Basil Blackwell, 1953, hal. 131.

Pada mulanya, kita harus memahami bahwa sekarang ini transfer sumber daya harus dipandang dalam kaitannya dengan rencana pembangunan. Walaupun alasan bagi akselerasi akumulasi modal sebagai sasaran sentral dari suatu program pembangunan seringkali secara naif didasarkan pada rasio seluruh modal output dan rasio tabungan, tetapi sebagian besar negara berkembang memandang kebutuhan mereka akan modal asing berkaitan erat dengan program pembangunan nasional mereka. Melalui berbagai sarana kebijaksanaan, negara-negara penerima bantuan berusaha mempengaruhi jumlah, komposisi dan penggunaan transfer modal. Negara-negara pemberi bantuan juga mendorong dilakukannya perencanaan pembangunan sebagai prasyarat bagi penerimaan bantuan keuangan luar negeri. Jadi, tidak seperti halnya konteks klasik pergerakan modal atau tafsir historis dari masa-masa sebelumnya mengenai investasi asing, peranan modal asing dewasa ini di negara-negara miskin tidak dapat dipelajari terpisah dari rencana pembangunan.

Dalam konteks program pembangunan, modal asing mempunyai peran rangkap untuk memungkinkan negara penerima dapat meningkatkan tingkat investasinya dan menambah impor. Walau dalam rangka program pembangunan yang umum, tidak ada kemungkinan untuk mengetahui sesuatu sumber dana dengan jenis spesifik pemakaiannya, suatu arus masuk modal bersih dapat mengatasi semua dari tiga selisih berikut ini :

1. Nilai produk yang dipakai dikurangi nilai produk yang di-

hasilkan di dalam negeri;

2. Investasi bersih dikurangi tabungan bersih dalam negeri;
3. Nilai barang-barang dan jasa yang diimpor, termasuk faktor pembayaran dikurangi nilai barang dan jasa yang diekspor, termasuk penerimaan faktor.

Sehingga permintaan akan modal asing bagi rencana pembangunan dapat dinyatakan baik sebagai kebutuhan untuk mengisi kesenjangan tabungan ataupun untuk menutup kesenjangan valuta asing.

Demikian juga, negara berkembang tidak sanggup mengawali industri-industri dasar dan industri-industri kunci secara sendirian. Sekali lagi melalui modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektrik berat dan kimia dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing pada suatu industri dapat mendorong perusahaan setempat dengan mengarah pada perluasan mata rantai industri terkait lainnya. Modal asing membantu mengindustrialisasikan perekonomian.

Selanjutnya, perusahaan swasta di negara berkembang enggan melakukan usaha yang mengandung resiko, seperti penggarapan sumber alam yang belum dimanfaatkan dan penggarapan daerah-daerah baru. Modal asing menanggung semua resiko dan kerugian yang timbul pada tahap perintisan. Dengan demikian modal asing membuka daerah baru, memanfaatkan sumber baru, dan membantu melipatgandakan sumber alam dan menghilangkan ketidakseimbangan kawasan.

✓ Sebagai akibat wajar pada apa yang telah dikemukakan di atas, kita dapat mengatakan bahwa pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, semuanya cenderung meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian. Dengan kata lain, pengimporan modal menciptakan lebih banyak pekerjaan di sektor perkotaan. Ini menimbulkan perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor pedesaan ke sektor perkotaan. Tekanan penduduk pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran terselubung dapat dihilangkan. Ini adalah keuntungan sosial yang diperoleh dari modal asing.

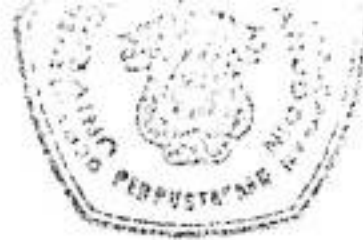
✓ Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung meningkatkan tingkat produktivitas, pendapatan dan pekerjaan nasional yang pada gilirannya mengarah pada upah riil buruh yang semakin tinggi, menurunnya harga bagi konsumen dan naiknya standar kehidupan mereka. Bila dengan masuknya modal asing tenaga kerja setempat menjadi terampil, maka produktivitas marginal terangkat, dengan demikian keseluruhan upah riil tenaga buruh. Juga bila industri baru diawali dengan mengimpor teknologi, manajemen, mesin dan peralatan tingkat tinggi, maka tersedia barang-barang baru dan bermutu dalam jumlah yang besar bagi konsumen dengan harga yang rendah. Bila investor swasta asing menginvestasikan modal mereka pada berbagai industri dan proyek suatu negara berkembang, mereka menerima keuntungan dan dalam hal-hal tertentu juga royalty yang dikenakan pajak oleh pemerintah negara pengimpor

por modal. Dengan demikian, dengan memajak keuntungan investor asing dan royalty yang diterima oleh mereka itu, pendapatan pemerintah bertambah.

Munculnya tekanan inflasi pada suatu negara sedang berkembang adalah tak terelakkan lantaran adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang-barang domestik, menyusul permulaan program investasi negara dalam jumlah besar. Yang terakhir ini mempunyai dampak meningkatkan secara cepat permintaan atas barang dan jasa dibandingkan dengan penawarannya. Ini mengarah pada tekanan inflasi yang menjadi semakin berat karena adanya kekakuan struktur yang menghambat peningkatan bahan makanan dan barang-barang konsumsi lainnya. Dengan mengalirnya bahan makanan dan barang konsumsi penting ke dalam negeri, modal asing dapat membantu meminimumkan tekanan inflasi tersebut. Secara tidak langsung pemasukan barang-barang konsumen melalui bantuan asing menaikkan tingkat konsumsi, yang pada gilirannya mempertinggi efisiensi produktif masyarakat.²

✓ Akhirnya, modal asing mengatasi kesulitan neraca pembayaran yang dialami oleh suatu negara terbelakang dalam proses pembangunan. Untuk mempercepat derap pembangunan ia perlu mengimpor barang-barang modal, komponen, bahan mentah, kecakapan teknik dan lain-lain. Selain itu, keperluan impornya akan bahan makanan meningkat secara cepat karena tekanan penduduk. Tetapi ekspor ke negara-negara maju menjadi ter-

²Ibid, hal. 167.



henti atau mempunyai kecenderungan menurun. Kesenjangan Kesenjangan antara ekspor dan impor menimbulkan kesulitan neraca pembayaran. Melalui modal asing negara terbelakang dapat memenuhi semua keperluan impornya dan pada saat yang sama menghindarkan kesulitan neraca pembayaran. Selanjutnya ada kebutuhan untuk menambah devisa untuk membayar hutang luar negeri. Ini menimbulkan problema neraca pembayaran yang sekali lagi dapat diselesaikan dengan mengimpor modal.

3.2. Jenis-Jenis Investasi Asing

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan/atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Walaupun pembiayaan pembangunan internasional telah didominasi oleh bantuan luar negeri, sekarang nampak bangkitnya kembali minat dalam peran potensi investasi swasta asing. Perhatian kita selanjutnya tertuju pada investasi swasta langsung dan pada peraturan nasional mengenai investasi semacam itu oleh negara-negara penerima modal.

Banyak negara menyadari bahwa arus masuk modal asing dapat memberikan sejumlah keuntungan kualitatif yang unik di atas modal pemerintah. Karena masalah pemanfaatan secara produktif tak akan timbul dengan investasi asing langsung. Investasi langsung ini berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara de facto atau de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor

modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk yaitu: Pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh asset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.³

Investasi tidak langsung lebih dikenal sebagai investasi portofolio atau reinter yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan, atas saham atau surat hutang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja.⁴

Modal asing negara terdiri dari (a) Pinjaman Bilateral yaitu pemberian pinjaman oleh pemerintah Inggris dalam bentuk poundsterling kepada pemerintah India; (b) Pinjaman lunak bilateral, yaitu penjualan bahan makanan dan produk perkebunan lainnya kepada India oleh Amerika Serikat berdasarkan PL 480; (c) Pinjaman multilateral, yaitu sumbangan

³M.L. Jhingan, The Economics of Development and Planning, Terj., oleh D. Guritno, CV. Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 607.

⁴Ibid, hal. 808

kepada Aid India Club, Colombo Plan dan lain-lain, oleh negara-negara anggota. Ke dalam kategori ini termasuk juga pinjaman yang disediakan oleh berbagai badan PBB seperti IFC, IBRD, IDA, SUNFED, UNDP dan lain-lain.

3.3. Bantuan Bersyarat dengan Bantuan Tidak Bersyarat

Seringkali dibedakan antara bantuan bersyarat dan bantuan tidak bersyarat. Bantuan bersyarat bisa karena sumber, proyek dan komoditi, atau bisa dua-duanya karena proyek dan sumber menjadi bantuan bersyarat ganda. Bantuan tidak bersyarat adalah suatu bantuan untuk tujuan umum dan juga dikenal sebagai bantuan program atau bantuan nonproyek.

3.3.1 Bantuan Bersyarat

Diperkirakan bahwa bantuan bersyarat karena sumber cenderung menaikkan biaya proyek lebih dari 30 persen pada negara penerima bantuan. Bantuan bersyarat ganda menaikkan biaya pengadaan bantuan lebih tinggi lagi. Ini jelas dari fakta bahwa negara penerima bantuan diharuskan membayar lebih mahal dibanding harga pasaran dunia sebagai persyaratannya kepada negara donor. Pembayaran itu akan lebih tinggi lagi jika seperti halnya dengan penawaran dari Amerika, negara penerima bantuan dipaksa mesin, suku cadang, bahan mentah dan lain-lain dengan menggunakan kapal-kapal dari negara donor. Ini cenderung mengurangi nilai riil bantuan. Selain itu bantuan bersyarat karena sumber mengganggu alokasi sumber-sumber investasi negara penerima bantuan. Program pembangunan menjadi bias terhadap proyek-proyek yang banyak

mempunyai komponen eks-impor tertentu yang ditentukan di dalam syarat-syarat bantuan bersyarat.

Bantuan bersyarat karena sumber juga membatasi dan dapat memaksa negara penerima modal untuk memakai teknik padat modal yang tinggi atau proyek yang mungkin tidak cocok bagi suatu suatu perekonomian surplus tenaga buruh.

Bantuan proyek didefinisikan sebagai bantuan yang pembayarannya dikaitkan dengan investasi modal di suatu kegiatan produksi yang terpisah.⁵ Menurut Alan Carlin, pendekatan proyek terhadap bantuan mempunyai sejumlah keuntungan, baik dari pandangan negara donor maupun negara penerima:

1. Ada kesempatan lebih luas untuk mempengaruhi proyek, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan, yang biasanya dibiayai oleh negara donor;
2. Ada pengawasan langsung oleh negara penerima dalam pemilihan proyek dalam hal-hal tertentu;
3. Ada alasan kuat untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara penerima bantuan di sektor perekonomian yang dibiayai dengan bantuan proyek tersebut;
4. Ada rangsangan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas proyek;
5. Ada kesempatan lebih baik untuk mempublikasikan program-program bantuan negara donor;
6. Semakin terbukanya informasi mengenai sektor-sektor per-

⁵Alan Carlin, "Projects versus Programme Aid from the Donor's viewpoint", Economic Journal, Maret 1967.

ekonomian negara penerima bantuan tempat proyek dibiayai.

7. Kurangnya pengaruh buruk pada neraca pembayaran negara donor jika bantuan proyek digabung dengan syarat karena sumber.⁶

Akan tetapi bantuan proyek mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Bantuan proyek bisa tidak bermanfaat bagi negara penerima bantuan, jika ia menghadapi kesulitan dalam mempertahankan impor. Selanjutnya, setiap upaya untuk menggunakan pengaruh mikro atau pengaruh proyek oleh negara donor akan membuat bantuan tersebut kurang menarik bagi penerima bantuan. Lebih dari itu, bantuan proyek menimbulkan fiksi birokratis yang rumit dalam perumusan dan pelaksanaan proyek.⁷ Bantuan yang dikaitkan pada proyek tertentu juga cenderung mengganggu prioritas investasi negara penerima bantuan yang mungkin harus menunda proyek-proyek lain yang sama pentingnya. Seringkali bantuan yang terlalu dikaitkan dengan penggunaan mesin-mesin tertentu, peralatan dan lain-lain menyebabkan kurang dimanfaatkannya sumber domestik seperti tenaga kerja karena hal itu menimbulkan bias terhadap proyek padat impor.⁸ Tidak kalah pentingnya, seperti halnya bantuan bersyarat karena sumber bantuan proyek menaikkan biaya riil pinjaman pada negara penerima bantuan bilamana negara tersebut harus membeli mesin, dan suku ca-

⁶Ibid, hal. 601.

⁷Ibid, hal. 602.

⁸I.M.D. Little dan J.M. Clifford, International Aid, 1965, hal. 115.

dang dari negara pemberi bantuan dengan harga tinggi. Menurut Jagdish Bhagwati, kenaikan itu mencapai 1/5 dari keseluruhan bantuan bersyarat dan pada hal-hal tertentu perbedaan harganya mencapai 100 persen atau bahkan lebih.⁹

3.3.2. *Bantuan tidak Bersyarat*

Bantuan program atau bantuan tidak bersyarat didefinisikan oleh Carlin sebagai bantuan yang pembayarannya dikaitkan pada pengeluaran negara penerima bantuan pada berbagai macam mata anggaran yang benar-benar didasarkan pada keseluruhan kebutuhan dan rencana pembangunan negara itu dari pada sekedar didasarkan pada suatu proyek tertentu. India menerima bantuan non-proyek dari Inggris dan Jerman dalam bentuk bantuan neraca pembayaran, bantuan penyelesaian utang dan untuk mengimpor bahan mentah, komponen dan suku cadang. Tentu saja bantuan seperti itu lebih disukai oleh negara-negara berkembang daripada bantuan bersyarat karena bebas menggunakan bantuan sesuai dengan program pembangunan mereka di bidang pertanian, industri, angkutan dan lain-lainnya. Bantuan program juga menurunkan nilai riil bila negara penerima bantuan dapat membeli keperluannya dengan bersaing dari pasaran dunia dan di dalamnya tidak ada bentrokan birokratis antar pemerintah seperti pada bantuan bersyarat. Selanjutnya negara penerima bantuan dapat menggunakan teknologi yang tepat sesuai dengan kekayaan faktor mereka dan mengalokasikan sumber-sumber dengan cara yang lebih baik dari pada

⁹J. Bhagwati (ed), "The Tying Aid" dalam Foreign Aid.

berdasarkan bantuan bersyarat. Akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Singer, bantuan program kelihatannya menjadi lebih populer di antara negara-negara penerima bantuan daripada bantuan proyek. Hal ini diharapkan dianggap sebagai suatu keuntungan dari bantuan program karena ia dapat memacu negara penerima bantuan untuk berusaha lebih keras dalam rangka memperoleh bantuan itu, di samping memperlancar hubungan antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan, Dapat dikatakan bahwa bantuan yang dikaitkan dengan proyek-proyek tertentu tertentu merupakan suatu rangsangan bagi negara-negara penerima bantuan untuk memikirkan pembangunan dalam arti proyek-proyek nyata..... Tentu saja pembangunan adalah lebih dari pada itu, dan pada kenyataannya lebih banyak pengeluaran yang dikategorikan sebagai uang atau sebagai konsumsi lebih dekat dengan arti pembangunan dibanding pengeluaran yang dikategorikan sebagai proyek atau pengeluaran modal. Dari pandangan yang belakangan ini, bantuan program, dan bahkan banyak bantuan anggaran tahunan jelas lebih disukai apabila negara donor sependapat dengan negara penerima bantuan dalam hal kebijaksanaan dan prioritas pembangunan.¹⁰

¹⁰H. Chenery & A. Stent, "Foreign Assistance and Economic Development", AER, 1956

3.4. Dua Jurang Model Bantuan Luar Negeri

Hollis Chenery dan beberapa penulis lain telah memperkenalkan pendekatan "dua jurang" pada pembangunan ekonomi. Dasar pemikirannya "jurang tabungan" dan "jurang devisa" merupakan dua kendala yang terpisah dan independen pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di negara kurang maju. Chenery melihat bantuan luar negeri sebagai suatu cara untuk menutup kedua jurang dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.¹¹

Untuk menghitung lebar jurang tersebut, suatu target pertumbuhan ekonomi ditetapkan bersama-sama dengan rasio model output tertentu. Jurang tabungan timbul bila laju tabungan domestik lebih kecil dari pada investasi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh, jika laju pertumbuhan pendapatan riil nasional adalah enam persen per tahun, dan rasio modal output 3 : 1, maka perekonomian tersebut harus menabung 18 persen dari pendapatan nasionalnya untuk mencapai target pertumbuhan ini. Jika hanya 12 persen tabungan yang dapat dimobilisasikan di dalam negeri, jurang tersebut menjadi enam persen dari pendapatan nasional. Perekonomian dapat mencapai target laju pertumbuhan tersebut dengan menutup jurang tabungan tersebut dengan bantuan luar negeri. Demikian pula, hubungan yang telah ditetapkan antara kebutuhan-kebutuhan devisa yang ditargetkan

¹¹H.W. Singer, "External Aid: for Plans or Projects?", Economic Journal, September 1965.

dan pendapatan netto ekspor. Jika pendapatan ekspor netto lebih kecil dari pada kebutuhan devisa, muncullah jurang devisa yang dapat ditutupi dengan bantuan luar negeri.

Kedua jurang tersebut dijelaskan dengan menggunakan lambang perhitungan pendapatan nasional :

$$E - Y = I - S = M - X = F$$

di mana E adalah pengeluaran nasional, Y adalah output nasional, I adalah investasi, S adalah tabungan, M adalah impor dan X adalah ekspor serta F adalah arus masuk modal netto.

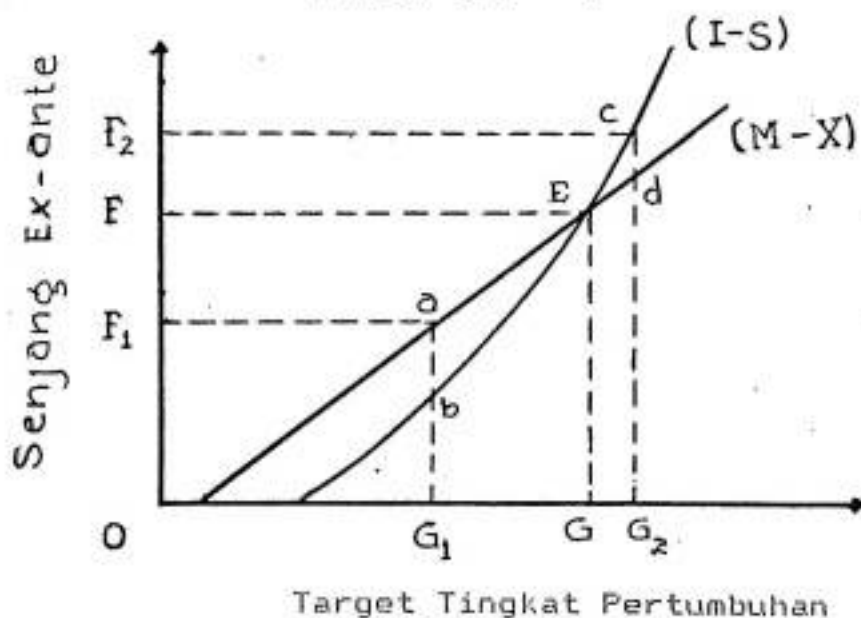
(I-S) adalah jurang tabungan domestik dan (M-X) adalah jurang devisa. Seperti halnya dalam perhitungan pendapatan nasional, kedua jurang tersebut pada mulanya selalu sama untuk sembarang periode perhitungan. Tetapi kemudian keduanya dapat berbeda karena dalam jangka panjang orang yang membuat keputusan mengenai tabungan, investasi, ekspor dan impor adalah orang yang berbeda. Sehingga selama proses perencanaan, rencana para penabung, investor, importir dan eksportir mungkin berbeda-beda. Investasi yang direncanakan (ex-ante) adalah berkaitan dengan target laju pertumbuhan ekonomi. Jika target ini tinggi, investasi juga akan tinggi. Tetapi tabungan domestik tergantung pada tingkat dan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Impor ex-ante meliputi input yang di impor yang diperlukan bagi pembangunan. Impor tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan distribusi pendapatan di antara sektor negara dan berba-

gai sektor perekonomian. Ekspor secara eksogen ditentukan oleh harga dunia dan oleh kualitas yang berubah karena musim atau keadaan.

Kalau setiap unsur tersebut diasumsikan independen, maka besar jurang tabungan dan jurang devisa tidak sama dalam pengertian ex-ante. Juga diasumsikan bahwa tabungan dan devisa tidak dapat didistribusikan satu sama lain. Selanjutnya, negara tidak dapat mentransformasikan tabungan potensialnya ke ekspor.

Berdasarkan asumsi ini, Gambar III - 1 menggambarkan kedua jurang ex-ante dan hubungannya dengan berbagai target laju pertumbuhan pendapatan. Jurang tabunga dan devisa ex-ante diukur sepanjang garis vertikal dan target laju pertumbuhan sepanjang garis horisontal. Jurang tabungan ex-ante diwakili oleh kurva (I-S) dan jurang devisa ex-ante oleh kurva (M-X).

Gambar III - 1



Keduanya sama pada titik E dan laju pertumbuhan OG dicapai dengan pemasukan bantuan luar negeri netto OF. Jika target laju pertumbuhan adalah OG_1 , maka jurang devisanya lebih besar daripada jurang tabungan sebanyak ab. Laju pertumbuhan ini tidak akan tercapai karena arus masuk modal asing tidak cukup menutup jurang devisa OF_1 yang semakin besar.

Kekuatan-kekuatan jangka pendek mungkin dapat menyamakan kedua jurang ex-post tanpa mencapai target tingkat pertumbuhan. Sebaliknya jika target laju pertumbuhan adalah OG_2 , jurang tabungan akan lebih besar dari pada jurang devisa sebanyak cd. Juga laju pertumbuhan ini tidak akan dicapai karena arus masuk modal asing tidak cukup untuk menutup jurang tabungan. Ia memerlukan arus masuk modal asing yang lebih besar guna memenuhi jurang tabungan OF_2 yang semakin lebar tersebut. Impor tidak dapat dikurangi karena sifat dan keterbatasan fleksibilitas sistem produksi dan komposisi permintaan konsumsi. Untuk mengatasi kekakuan struktural ini, Chenery menyarankan pada pembatasan pola konsumsi, distribusi pendapatan, tingkat dan pertumbuhan pekerjaan dan perubahan nilai tukar. Langkah-langkah seperti itu dapat membawa penyesuaian diri pada kedua jurang tersebut tanpa bantuan luar negeri. Tetapi langkah-langkah tersebut akan memperlambat pertumbuhan.

Beberapa ahli ekonomi mempunyai pandangan bahwa apabila harga bersifat fleksibel, kekakuan seperti itu barangkali tidak akan ditemui. Jika sumber dialokasikan secara

optimal, maka hanya akan terdapat kendala terhadap pertumbuhan dan karena itu hanya terdapat jurang tabungan pada perekonomian tersebut. Jika diterapkan kebijaksanaan nilai tukar atau kebijaksanaan harga yang tepat, sumber-sumber akan bergerak menghilangkan perbedaan antara efek pertumbuhan impor dan impor dan tabungan domestik, karenanya menghilangkan perbedaan pada jurang ex-ante tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa jika jurang devisa bersifat dominan, hal itu pasti disebabkan oleh kebijaksanaan harga yang tidak tepat yang dapat mengakibatkan alokasi sumber-sumber.

Bantuan luar negeri yang diperlukan untuk menutup jurang tersebut ditentukan oleh jurang yang dominan dalam bilangan waktu tertentu. Jika jurang tabungan lebih besar dari pada jurang devisa, perekonomian dikatakan berada pada kendala tabungan. Pada sisi lain, jika jurang devisa lebih besar dari pada jurang tabungan, perekonomian berada pada kendala devisa. Bantuan luar negeri dapat menolong dalam meniadakan kendala tabungan tersebut melalui pemasukan modal. Dalam jangka panjang, jumlah bantuan luar negeri yang diperlukan akan menyamakan perbedaan antara kenaikan pada investasi dan kenaikan pada tabungan yang dihasilkan oleh pendapatan yang meningkat. Bila jurang tabungan lenyap target laju pertumbuhan akan dapat dipertahankan.

3.5. Biaya dan Manfaat dari Bantuan

Bantuan luar negeri yang mengalir dari negara donor dalam bentuk hibah, pinjaman, bantuan teknis, sumbangan dalam bentuk natura dan sebagainya kepada negara penerima merupakan biaya riil bagi yang disebut pertama dan keuntungan bagi yang disebut terakhir. John Pincus mengukur dana biaya riil arus modal bagi eksportir modal sebagai pendapatan yang dikorbankan sebagai akibat dari pengeluaran modal tersebut, mengingat adanya alternatif lain penggunaan modal yang sama. Keuntungan riil bagi importir modal diukur dengan kenaikan marginal netto pendapatan sebagai akibat dari penanaman modal yang diterima tersebut, jika dibandingkan dengan melakukan investasi yang sama dengan modal dari sumber alternatif.

Untuk mengukur arus modal dari negara maju ke negara kurang maju, Pincus mengemukakan konsep "*padanan hibah*". Hibah adalah sejenis pemberian dari negara maju kepada negara kurang maju di mana yang disebut belakangan tidak perlu membayar bunga atau melakukan pembayaran kembali. Pinjaman yang diberikan negara maju dengan syarat lunak seperti suku bunga rendah, periode bebas pajak dan periode pembayaran kembali yang panjang mengandung beberapa unsur kelonggaran dibandingkan dengan persyaratan pasar komersial. Unsur kelonggaran di dalam pinjaman tersebut dapat dikatakan sebagai padanan hibah.

Keuntungan riil dari pinjaman bantuan si penerima

mungkin berbeda dengan biaya riilnya bagi negara donor. Keuntungan riil dari suatu pinjaman akan bergantung pada tingkat-tingkat penghasilan (tingkat diskonto) di negara penerima dibandingkan dengan suku bunga yang dikenakan oleh negara donor. Jika tingkat penghasilan untuk pinjaman yang serupa di negara penerima adalah lebih tinggi ketimbang suku bunga pinjaman bantuan, keuntungan riil suatu pinjaman bagi si peminjam akan menjadi lebih besar, dan sebaliknya.

Di samping tergantung pada tingkat penghasilan dan suku bunga pinjaman, biaya riil dan keuntungan riil pinjaman bantuan tergantung pada periode bebas pajak dan periode pembayaran kembali. Jika tingkat penghasilan lebih tinggi ketimbang tingkat bunga pinjaman di negara pemberi pinjaman dan periode bebas pajak dan periode pengembalian lebih panjang, biaya riil bagi donor menjadi tinggi, dan sebaliknya. Pada sisi lain, jika tingkat penghasilan pada negara penerima lebih tinggi ketimbang tingkat bunga pinjaman dan periode bebas pajak dan periode pembayaran kembali lebih lama, keuntungan riilnya bagi donor akan menjadi lebih besar, dan sebaliknya.

Tetapi sulit untuk menghitung biaya riil bantuan bila bantuan itu bersyarat dan dalam bentuk sumbangan berbentuk natura. Jika negara donor mengikat bantuan dengan meminta negara penerima untuk mengimpor dari negara donor, padanan hibahnya akan berkurang bagi si penerima. Biaya riil bagi negara donor bisa jadi lebih rendah karena mungkin ia mema-



sok barangnya dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga pasar dunia. Karena padanan hibahnya dalam hal ini turun, keuntungan riil bagi si penerima bantuan bersyarat juga turun. Sama halnya bila si negara donor memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan berbentuk natura seperti surplus komoditi pertanian yang dinilai dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga pasar dunia. Sebaliknya yang akan terjadi bila bantuan tidak bersyarat dan barang dinilai dengan harga pasar dunia.

Karenanya, dalam menghitung biaya riil bantuan luar negeri bagi negara donor dalam perekonomian full employment, John Pincus memasukkan jumlah :

1. Hibah termasuk bantuan teknik, berdasarkan nilai nominal;
2. Pinjaman yang dinilai dari perbedaan antara jumlah pinjaman dan nilai saat ini yang didiskontokan berdasarkan suku bunga pasar;
3. Sumbangan dalam bentuk natura yang dinilai dengan harga pasar dunia; dan
4. Penjualan atau pinjaman yang dapat dibayar kembali dengan mata uang negara penerima dinilai sebagai hibah, setelah memperhatikan dana sebenarnya yang dikeluarkan oleh donor di negara penerima.

Analisa perhitungan biaya riil bagi negara donor ini didasarkan pada asumsi tertentu. *Pertama*, diasumsikan bahwa sumber dipergunakan sepenuhnya di negara donor. Dalam hal sumber kurang dipergunakan bantuan yang mengandung biaya

riil jika sumber digeser dari proyek domestik aktual kepada bantuan luar negeri. Jika proyek-proyek domestik itu belum dilaksanakan sepenuhnya, maka bantuan itu tidak mengandung biaya riil. *Kedua*, analisa ini mengasumsikan bahwa harga dan jasa di bawah bantuan bersyarat dinilai berdasarkan harga pasar dunia. *Ketiga*, padanan hibah untuk setiap tahun diukur tanpa mengurangi pembayaran hutang dan bunga dari pinjaman terdahulu.

Analisa tadi dapat juga diterapkan pada keuntungan riil arus masuk modal bagi penerima. Semakin tinggi padanan hibahnya bagi penerima, semakin besar pula keuntungan riilnya bagi mereka. Padanan hibah itu lebih tinggi jika syarat-syarat bantuannya lebih lunak. Demikian pula jika sebagian besar porsi bantuan itu tidak bersyarat, semakin besar pula keuntungan riil negara penerima. Di dalam keadaan seperti itu, jumlah nominal arus masuk modal yang sama akan menyebabkan kenaikan keuntungan riil. Jika syarat-syarat bantuan dibuat lebih lunak dan pengaruh buruk bantuan dikurangi, keuntungan riil pemasukan modal bagi negara penerima semakin mendekati nilai nominal pemasukan modal itu.

Walaupun keuntungan riil bantuan diukur seperti biaya riilnya, namun nilainya biasanya berbeda dengan yang disebutkan terakhir karena sejumlah alasan. *Pertama*, suku bunga diskonto biasanya berbeda di negara donor dan negara penerima. Jika tingkat diskonto di negara penerima lebih rendah bila dibandingkan dengan donor. *Kedua*, di negara yang mene-

rapkan pengendalian devisa, tingkat diskonto yang harus dibayar oleh negara penerima akan menyamai tingkat di pasar obligasi internasional. Jika mata uang negara donor dinilai tinggi, tingkat diskonto negara penerima dengan demikian harus dinaikkan pula. *Ketiga*, bantuan bersyarat akan menurunkan padanan hibah jika negara donor menetapkan harga barang dan jasanya lebih tinggi ketimbang harga dunia. Ini akan mengakibatkan perbedaan antara perkiraan biaya bagi negara donor dan perkiraan keuntungan si penerima mengenai padanan hibahnya.

Keempat, sulit untuk menghitung keuntungan dari investasi swasta. Khususnya efek bantuan teknik dan alih teknologi yang bermanfaat pada negara penerima dicengkram oleh beberapa kesulitan teknis. Semua pertimbangan ini membawa kepada perbedaan antara keuntungan riil bantuan bagi negara penerima dengan biaya riil bagi negara donor dan dengan demikian estimasi padanan hibah bagi si penerima dan si pemberi.

Analisa biaya-keuntungan bantuan luar negeri ini menghasilkan implikasi kebijaksanaan tertentu. Syarat bantuan lunak menaikkan biaya riil bagi negara donor. Bantuan bersyarat menurunkan biaya riil pada donor. Pada waktu yang sama, bantuan bersyarat menaikkan beban pembayaran kembali bagi penerima dan mengurangi keuntungan riil bantuan. Karena itu disarankan agar negara penerima bantuan sejauh mungkin lebih menekankan pada bantuan tak bersyarat.

3.6. Penanaman Modal Asing Swasta

Pada peralihan abad ini, kebanyakan modal asing swasta mengalir dalam bentuk investasi tidak langsung dari Eropa ke negara terbelakang. Yang berbentuk investasi langsung hanya tertuju ke bidang produksi ekspor, sedangkan untuk bidang manufaktur tidak begitu banyak. Tetapi sejak Perang Dunia Kedua, lebih dari separuh investasi swasta merupakan investasi langsung. Investasi swasta langsung biasanya terpusat pada eksploitasi bahan mentah seperti besi, minyak, mangan, bauksit, tembaga, energi listrik dan sebagainya. Manufaktur tetap saja kurang diminati. Baru ketika perekonomian lepas landas, investasi-investasi langsung menyerbu perusahaan manufaktur. Itulah sebabnya mengapa investasi langsung pada perusahaan manufaktur mengalir ke negara yang industrinya belum begitu maju dan mempunyai pasar domestik yang luas.

3.6.1. Kelebihan Investasi Langsung

Kesukaan pada investasi langsung ketimbang investasi portofolio pada tahun-tahun terakhir berkaitan dengan kelebihan tertentu yang dimiliki oleh investasi langsung :

1. Investasi asing langsung memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir ke negara terbelakang.
2. Pada gilirannya, ia akan mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerja sama dengan perusahaan asing.

Pada kenyataannya, perusahaan asing mendorong perusahaan lokal dengan dua cara: secara langsung, membantu perkembangan perusahaan lokal dengan tenaga manusia, uang dan bahan serta memberikan latihan dan pengalaman kepada personil, dan secara tidak langsung menciptakan permintaan bagi jasa-jasa tambahan (seperti agen transportasi dan latihan) yang bagi perusahaan asing swasta tidak ekonomis ditangani sendiri.

3. Investasi langsung mempunyai keuntungan tambahan melebihi investasi portofolio — dalam hal negara terbelakang memperoleh jumlah modal yang lebih besar. Sebagian laba dari investasi langsung pada umumnya ditanamkan kembali ke dalam pengembangan, modernisasi atau pembangunan industri yang terkait.
4. Investasi asing swasta disalurkan kepada penggunaan yang logis dan produktif. Karenanya ia menambah kapasitas produksi negara peminjam modal.
5. Dalam hal investasi langsung, kemungkinan pelarian modal dari negara peminjam kurang dan karena itu juga dimungkinkan beban neraca pembayaran menjadi kecil selama depresi karena investasi langsung, tidak seperti obligasi, dibayar dengan deviden yang dikaitkan dengan laba.
6. Pada tahap awal pembangunan, investasi asing langsung juga meringankan beban neraca pembayaran negara terbelakang karena tenggang waktu antara pengoperasian perusahaan bisnis baru dan perolehan laba adalah lama. Selain itu

pada tahap awal produksi, laba mungkin kecil. Jadi perolehan laba dari investasi langsung kurang membawa tekanan pada neraca pembayaran bila dibandingkan dengan investasi portofolio.

7. Karena investasi asing langsung mengalir ke sektor pertanian dan industri pengolahan yang memproduksi barang-barang primer untuk ekspor, ia selanjutnya membantu meringankan posisi neraca pembayaran negara terbelakang. Dalam hal negara berkembang seperti India, umpamanya, investasi langsung sangat berakibat baik pada neraca pembayaran karena ia membantu memproduksi barang-barang manufaktur, tidak hanya bagi pasar domestik tetapi juga bagi pasar luar negeri.
8. Akhirnya, investasi langsung yang mengalir ke negara yang sedang berkembang terkadang mendorong pengusahanya untuk menanam modal di negara terbelakang lain. Perusahaan di India mulai melakukan investasi di Nepal, Uganda, Ethiopia dan Kenya sementara mereka tetap meminjam dari luar negeri.

Akan tetapi ditinjau dari sudut suku bunga investasi portofolio memang lebih baik daripada investasi langsung karena ia tidak memerlukan biaya yang lebih besar. Pengusaha lokal akan memiliki kemungkinan lebih banyak untuk mengawasi penggunaannya disamping rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk meletakkan daripada saluran yang mendatangkan hasil. Walau begitu, investasi portofolio kehilangan maknanya jika

dibandingkan dengan investasi langsung.

3.6.2. Hambatan Pada Investasi Asing Swasta

Faktor-faktor yang menghambat investasi asing swasta di negara terbelakang tidak hanya faktor ekonomi tetapi juga politik, hukum dan budaya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kecilnya pasar domestik yang menyebabkan Rate of Return pada modal rendah;
2. Kekurangan fasilitas dasar, seperti transpor, tenaga dan keperluan umum lainnya, sistem perbankan dan kredit, dan buruh terampil;
3. Pembatasan pada pembayaran laba dan repatriasi modal, atau kekhawatiran akan penolakan sekaligus kesemua itu;
4. Ancaman pengambilalihan, nasionalisasi, atau pemilikan oleh negara, dan reservasi jenis industri tertentu bagi perusahaan domestik;
5. Pengangkutan perusahaan asing secara ketat untuk tujuan nasional dengan menetapkan pagu penghasilan, dengan diskriminasi pajak laba, dan dengan mewajibkan perusahaan asing untuk melatih dan memperkerjakan sejumlah tertentu buruh lokal tidak hanya pada posisi biasa tetapi juga pada posisi eselon tinggi;
6. Pengendalian devisa yang ketat dan khususnya keruwetan dan kelambatan administratif yang berkaitan dengan pengendalian alat tukar;
7. Kekhawatiran diskriminasi pada pengadilan lokal karena perbedaan konsepsi hukum; dan

8. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, perang dingin dan kecenderungan sosialis di negara terbelakang menyebabkan ketidakmenentuan dan kekurangyakinan pihak investor asing negara kapitalis. Sebagai akibatnya, modal asing menjadi enggan masuk ke negara terbelakang.

3.6.3. Langkah-langkah Untuk Mendorong Investasi Asing

Swasta

Untuk mendorong arus modal asing swasta ke negara terbelakang, dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan keamanan harta dan jiwa di negara peminjam modal adalah syarat pertama terciptanya iklim yang menguntungkan bagi pemasukan investasi. Akan tetapi, masalah stabilitas politik dan keamanan internal adalah di luar bidang para ahli ekonomi. Namun penyediaan fasilitas asuransi jiwa dan kekayaan bagi orang asing dapat membantu. Untuk ini, pemerintah dari negara-negara yang meminjam modal harus mendirikan perusahaan asuransi milik mereka sendiri. Sebagai kemungkinan lain, pemerintah pemberi pinjaman dapat memberikan jaminan dan mengansuransikan resiko dari investasi asing yang telah disetujui.
2. Pemerintah negara terbelakang harus memberikan informasi kepada perusahaan asing mengenai ruang lingkup kesempatan investasi. Informasi seperti itu dapat disebarluaskan melalui konsultan dagang mereka yang ditempatkan di negara maju. Di samping itu, organisasi seperti Pusat Investasi di India dapat didirikan oleh para negara terbelakang di

negara-negara maju.

3. Pemerintah negara peminjam modal bisa menurunkan biaya produksi perusahaan asing dengan menyediakan fasilitas dasar yang memadai di dalam negeri. Itu memerlukan usaha investasi secara terus menerus oleh pihak penguasa negara bersangkutan. Demikian pula, kelangkaan buruh lokal yang terlatih harus diatasi dengan mengembangkan fasilitas pendidikan teknik.
4. Jika negara terbelakang hendak menarik modal asing swasta mereka harus memberikan fasilitas bagi pengalihan laba, deviden, bunga dan pinjaman pokok dengan memperhatikan posisi neraca pembayaran sendiri. Untuk ini negara peminjam modal harus memberikan jaminan pengalihan atau bahkan lebih baik negara peminjam dan negara yang memberi pinjaman mengadakan perjanjian bilateral untuk mengatur syarat-syarat pengalihan modal dan penghasilan tersebut.
5. Jelas bahwa persoalan utama bagi seorang kapitalis adalah keamanan modal. Karena itu, untuk menarik modal asing, pemerintah negara terbelakang harus memberikan jaminan tidak akan menasionalisasikan perusahaan asing selama periode tertentu, dan sekiranya ada nasionalisasi akan segera membayar ganti rugi yang wajar dan cukup serta disetujui sebelum pengambilalihan dilaksanakan dan dapat dialihkan ke negara asal dengan nilai tukar yang berlaku pada hari diberlakukannya nasionalisasi. Tetapi, dalam hal tidak ada persetujuan, kasus seperti itu harus dise-

lesaikan melalui arbitrase. Problem besar dalam hal arbitrase adalah tidak ada negara berdaulat yang bersedia menerima keputusan yang bertentangan dengan kepentingannya.

6. Rangsangan pajak mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengusaha bisnis. Baik negara pengimpor maupun pengeksport modal dapat memberikan keringanan pajak, tetapi dalam praktek, negara yang disebut belakangan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukannya karena penerimaan pajak mereka yang lebih tinggi dan kemampuannya menyerap kerugian dalam penerimaan yang timbul. Rangsangan pajak oleh negara pemberi pinjaman dapat berupa: (i) sistem kredit pajak sebagaimana ditemui di Kanada, Amerika Serikat dan Inggris; (ii) perjanjian bilateral antara pemerintah negara pemberi pinjaman dan negara peminjam untuk menghapuskan pajak ganda; (iii) penghapusan semua pajak atas pendapatan bisnis yang diperoleh di luar negeri. Negara pengimpor modal juga dapat mengambil langkah-langkah perpajakan tertentu yaitu: (i) pembebasan pajak bagi perusahaan asing selama periode tertentu sesudah investasi awal (ii) rabat pembangunan pada investasi modal baru; (iii) rabat pada laba yang tidak dibagi; (iv) keringanan penyusutan tambahan pada investasi baru.
7. Selain itu, usaha patungan merupakan pendorong bagi pemasukan modal ke negara terbelakang. Perusahaan patungan dapat dilakukan di sektor swasta dan sektor negara di

mana investor asing bekerjasama dengan investor lokal atau pemerintah. Perusahaan seperti itu menghilangkan prasangka yang ada terhadap modal asing dan yang lebih utama cenderung menghilangkan resiko pengambilalihan. Pihak asing dapat menyumbang dengan pemberian modal bersih, keterampilan teknik, peralatan modal dan mesin. Dalam hal modal bersih mereka tidak boleh memegang mayoritas saham. Paling banyak 49 persen. Pihak asing memperlihatkan proses usahanya kepada mitra usaha lokalnya dan menyediakan fasilitas latihan kepada buruh lokal.

8. Negara pengimpor modal harus memberlakukan kebijaksanaan yang sama terhadap investasi asing dan terhadap investasi domestik; pajak yang sama baik pada pihak asing maupun mitra usaha nasionalnya; dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi perlindungan jiwa dan hak atas kekayaan dan kepentingan. Tidak akan ada pembatasan pada penerimaan personil administratif dan teknis dan pemilihan manajer. Bahkan tidak akan dilakukan pembatasan imigrasi personil teknis perusahaan asing, kecuali untuk keamanan nasional. Pada sisi lain, mereka harus diberikan perlakuan yang lebih baik. Tetapi, diwajibkan bagi perusahaan asing untuk melatih buruh lokal.

Namun demikian, terlalu banyak menggantungkan nasib pada perlindungan dan rangsangan dalam bentuk peraturan investasi, jaminan, kewajiban perjanjian dan tindakan-tindakan fiskal atau langkah-langkah legislatif tidak akan

egitu mendorong arus investasi asing swasta. Pada kenyataannya, pengalaman dan keuntungan ekonomi nyata yang menguntungkan pribadi investorlah yang dapat meratakan jalan bagi arus deras modal asing swasta. Apa yang diperlukan sebenarnya adalah "waktu dan kekeluargaan yang semakin erat melalui persahabatan".¹²

7. Penanaman Modal Asing Negara

Investasi asing negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah lebih penting ketimbang modal asing swasta. Kebutuhan keuangan negara terbelakang begitu besar sedang investasi asing swasta hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil saja. Karena sesuatu hal, investasi asing swasta tidak mau terlibat dengan masalah pengeluaran modal seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, program medis, latihan teknis dan penelitian dan sebagainya. Sekalipun bidang-bidang tersebut secara tidak langsung meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas perekonomian, tetapi dalam jangka panjang tidak memberikan keuntungan langsung dan karena itu hanya dapat diandalkan pada bantuan hibah negara maju. Lebih jauh, investasi asing swasta mensyaratkan adanya jasa pelayanan umum pokok di negara terbelakang. Tetapi investasi di bidang ini memerlukan jumlah dana dan resiko besar di mana modal swasta tidak akan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu investasi pada proyek-proyek "*berbuah rendah*" dan

¹²G.M. Meier dan R.E. Baldwin, Economic Development: Theory, History, Policy, hal. 12

begitu mendorong arus investasi asing swasta. Pada kenyataannya, pengalaman dan keuntungan ekonomi nyata yang menguntungkan pribadi investorlah yang dapat meratakan jalan bagi arus deras modal asing swasta. Apa yang diperlukan sebenarnya adalah "waktu dan kekeluargaan yang semakin erat melalui persahabatan".¹²

3.7. Penanaman Modal Asing Negara

Investasi asing negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah lebih penting ketimbang modal asing swasta. Kebutuhan keuangan negara terbelakang begitu besar sedang investasi asing swasta hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil saja. Karena sesuatu hal, investasi asing swasta tidak mau terlibat dengan masalah pengeluaran modal seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, program medis, latihan teknis dan penelitian dan sebagainya. Sekalipun bidang-bidang tersebut secara tidak langsung meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas perekonomian, tetapi dalam jangka panjang tidak memberikan keuntungan langsung dan karena itu hanya dapat diandalkan pada bantuan hibah negara maju. Lebih jauh, investasi asing swasta mensyaratkan adanya jasa pelayanan umum pokok di negara terbelakang. Tetapi investasi di bidang ini memerlukan jumlah dana dan resiko besar di mana modal swasta tidak akan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu investasi pada proyek-proyek "*berbuah rendah*" dan

¹²G.M. Meier dan R.E. Baldwin, Economic Development: Theory, History, Policy, hal. 12

"*lambat berbuah*" hanya mungkin dilakukan atas dasar pinjaman negara. Selain itu, tidak seperti investasi asing swasta, pinjaman luar negeri dapat dipakai oleh negara peminjam sesuai dengan program pembangunannya. Karena itu tidak banyak yang dapat diharapkan dari investasi asing swasta.

Tetapi ada kesadaran yang semakin tumbuh bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran di tempat lain. Negara maju merasa mempunyai kewajiban moral untuk membantu saudara-saudaranya yang kurang beruntung di negara terbelakang. Namun kesadaran negara maju akan hal ini tidak pernah tulus. Mereka selalu didorong oleh kebijaksanaan internasional dalam suasana perang dingin. Tujuan mereka adalah memberi bantuan dengan mencantelkan syarat.

3.7.1. *Faktor-faktor Yang Menentukan Jumlah bantuan Luar Negeri Bagi Pembangunan Ekonomi*

Jumlah bantuan luar negeri yang mengalir ke negara terbelakang, betapapun tergantung pada sejumlah faktor.

Pertama adalah *tersedianya dana*. Negara-negara maju seharusnya menyediakan cukup modal untuk di ekspor. Tetapi mereka tidak menyediakan modal surplus dalam jumlah yang cukup besar. Kecuali Amerika Serikat, sangat sedikit sekali negara yang mau meminjamkan modal yang diperlukan negara terbelakang sampai sejumlah 10-15 juta dollar per tahun. Beberapa negara maju seperti Kanada dan Australia sendiri meminjam dari Amerika Serikat dan Inggris untuk membiayai proyek pembangunan mereka. Tetapi usaha-usaha yang sungguh-sungguh

oleh negara kaya untuk menggalang modal surplus sebenarnya dapat memenuhi keperluan negara terbelakang.

Faktor *kedua* adalah *daya serap negara penerima*. Negara terbelakang harus mendapatkan bantuan asing sebanyak yang dapat mereka investasikan secara bermanfaat. Daya serap mencakup semua hal dimana kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan, untuk mengubah struktur perekonomian dan untuk mengalokasikan kembali sumber, dibatasi oleh kurangnya faktor-faktor penting, problem kelembagaan atau organisasi yang tidak sesuai. Struktur perekonomian bersama-sama dengan pendayagunaan kapasitas yang ada akan menjadi landasan penting bagi daya serap suatu negara.

Faktor *ketiga* adalah *tersedianya sumber-sumber*. Jika suatu negara terbelakang mempunyai sumber manusia dan sumber alam yang kurang memadai, kekurangan ini akan menjadi penghambat bagi pemanfaatan secara efektif modal asing. Akibatnya menjadi semakin sulit bagi negara seperti itu untuk memanfaatkan bantuan asing yang tersedia. Tetapi kekurangan sumber alam tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi.

Faktor *keempat* adalah *kemampuan negara penerima untuk membayar kembali*. Ini merupakan problem yang paling langsung karena beban pembayaran pinjaman menjadi penghambat bagi negara terbelakang untuk mengambil pinjaman dalam jumlah besar. Masalah itu sendiri berkaitan erat dengan kemiskinan yang mencekam mereka. Kemampuan untuk membayar kembali dalam

pada itu tergantung kepada kemampuan mereka untuk meng-
ekspor dan kemampuan mereka menggali sumber-sumber devisa.

Terakhir, mungkin faktor yang paling penting, adalah *kemauan dan usaha si negara penerima untuk membangun*. Modal yang diterima dari luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika diinginkan dan dibarengi dengan usaha di pihak negara penerima. Sebagaimana dikatakan Nurkse "Modal sebenarnya di dalam negeri". Peranan modal asing adalah sebagai sarana efektif untuk mobilisasi keinginan suatu negara.

3.7.2. *Bantuan atau Perdagangan*

Belakangan, muncul pendapat di antara negara kurang maju bahwa perdagangan, dan bukan bantuan, adalah lebih penting bagi pembangunan mereka yang cepat. Dikatakan bahwa negara maju ternyata gagal memenuhi keperluan bantuan negara sedang berkembang selama dasawarsa pembangunan tahun-tahun 1970-an. Suatu resolusi UNCTAD yang diambil oleh sebagian negara maju, dalam satu hal, memberikan kewajiban kepada mereka agar menyumbang setiap tahun kepada negara kurang maju sekurang-kurangnya satu persen dari pendapatan nasional netto mereka setelah dikurangi dengan penarikan modal eksternal termasuk amortisasi dan pembayaran kembali. Tetapi mereka tidak berhasil menyumbang lebih dari 0,5 persen dari pendapatan nasional mereka. Hal ini sangat mengecewakan, sementara kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk menyerap lebih banyak bantuan menjadi semakin meningkat dan

keadaan perekonomian mereka sebagai hasil bantuan juga makin membaik. Meier mengamati dengan seksama bahwa :

"Arus modal asing dari negara maju kepada negara kurang maju tidak pernah meningkat, dan problema pelunasan hutang luar negeri semakin berat ; karena itu surplus impor yang ditunjang modal asing merosot secara mencolok pada tahun-tahun terakhir ini, dan pengalihan sumber-sumber di luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara kurang maju. Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak akan memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan. Akibatnya negara kurang maju itu terpaksa menempuh salah satu atau gabungan dari kebijaksanaan berikut ini : mengurangi laju pertumbuhan negara, mengganti impor, mengembangkan ekspor, memperbaiki terms of trade, atau merangsang arus bantuan asing yang lebih besar".¹³

Arus masuk bantuan asing yang lebih deras tidak akan mungkin dan tidak dapat diharapkan oleh negara kurang maju. Bantuan asing jelas sangat membantu bagi rencana pembangunan negara seperti itu, tetapi negara maju tidak bersedia memberikan bantuan sebesar yang diperlukan oleh negara kurang maju.

Tetapi kebijaksanaan yang mengutamakan perdagangan dan bukan bantuan hanya dapat berhasil jika tabungan domestik meningkat sama tingginya dengan kenaikan pada penerimaan ekspor. Perdagangan akan menggantikan peranan bantuan bila penerimaan ekspor menaikkan pendapatan nasional sehingga tabungan pun menjadi meningkat. Perdagangan juga membantu dalam mengalihkan sumber-sumber riil untuk investasi bila negara kurang maju mampu menetapkan harga yang lebih tinggi atas ekspor mereka ke negara maju di bawah perjanjian perdagangan preferensi. Negara sedang berkembang dengan laju pem-

¹³Ibid, hal. 16.

bangunan yang tinggi seperti India, Brasil dan sebagainya, mampu menggunakan penerimaan ekspor mereka untuk pembentukan modal berikutnya tetapi tidak akan ada negara maju yang bersedia membeli pada harga yang lebih tinggi daripada pasar dunia. Jadi yang perlu adalah menstabilkan tingkat harga di negara sedang berkembang dan setelah itu perdagangan dapat dengan mulus menggantikan bantuan luar negeri.

Tetapi, negara-negara yang sedang berada pada tahap awal tidak perlu memikirkan penggantian bantuan dengan perdagangan karena untuk jangka panjang mereka hanya akan dapat mengembangkan perdagangan melalui bantuan.

3.8. Pengaruh Bantuan Atas Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai permasalahan bagaimana pengaruh pemasukan modal khususnya bantuan luar negeri atas tabungan (saving) dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, seringkali ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat antara berbagai ahli ekonomi. Pada satu pihak, hasil-hasil studi tertentu¹⁴ menemukan bahwa bantuan luar negeri kurang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan ada pula di antara studi lainnya¹⁵ menemukan adanya pengaruh negatif dari pemasukan modal luar negeri itu terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

¹⁴International Bank for Reconstruction and Development, World Development Report 1985, Oxford Univ. Press, 1985, hal. 15.

¹⁵Paul Mosley, "Aid, Saving and Growth Revisited", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 42, No. 2 May 1980, hal. 81

Di lain pihak, hasil tertentu lainnya khususnya mengenai negara-negara Asia,¹⁶ menunjukkan bahwa pinjaman atau bantuan luar negeri, seperti halnya dengan tabungan domestik memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, baik hasil studi Dowling dan Hiemenz tersebut maupun hasil studi Gupta dan Islam menyimpulkan bahwa sesungguhnya tabungan domestik dan bantuan luar negeri kedua-duanya mempunyai kontribusi positif pada laju pertumbuhan ekonomi akan tetapi pengaruh tabungan domestik jauh lebih penting dibandingkan dengan pengaruh bantuan luar negeri.¹⁷

Hasil-hasil tersebut di atas pada umumnya didasarkan pada studi cross-section dengan periode waktu yang seringkali berbeda satu sama lainnya serta dengan mengambil sampel-sampel negara yang berlainan pula. Model-model persamaan yang digunakan terutama adalah regresi single equation, regresi least square, dan pendekatan simultaneous equation, tergantung pada sifat dan hubungan variabel-variabel serta data yang tersedia. Dengan demikian sudah barang tentu hasilnya dapat bersifat khusus dan dapat berbeda satu sama lainnya.

¹⁶G.F. Papanek, "The Efek of Aid and Other Resource Transfers on Saving and Growth in LDC", in Economic Journal, No. 82, September 1972. Lihat juga tulisan owling dan Ulrich Hiemenz, "Aid, Saving and Growth in the Asian Region", The Developing Economies, Vol. xxi, No. 1, Januari 1983.

¹⁷K. Gupta dan M. Anisul Islam, Foreign Capital Saving and Growth: An International Cross-Section Study, Holland, 1983, hal. 123.

Di samping itu seringkali penemuan-penemuan dari berbagai studi itu tidak mudah diinterpretasikan karena beberapa alasan yaitu :

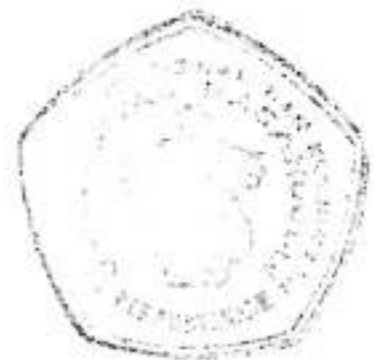
1. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi dan tabungan domestik sesuatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh aliran modal luar negeri saja tetapi juga oleh banyak faktor lainnya, seperti struktur ekonomi, sistem perpajakan, neraca perdagangan, pertumbuhan penduduk dan lain-lain yang kebanyakannya tidak diperhitungkan dalam analisa persamaan-persamaan tersebut;
2. Pemasukan modal khususnya pinjaman luar negeri, tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi pembangunan ekonomi di mana negara-negara miskin dapat menarik lebih banyak bantuan dana;
3. Terdapat time lag antara arus pemasukan modal dengan pengaruh pertumbuhannya dan kelambatan tersebut akan berbeda-beda oleh karena masa persiapan hingga beroperasinya proyek-proyek bantuan berlainan satu sama lainnya, daya serap pemasukan modal luar negeri juga berbeda antar negara;
4. Bagian (share) tertentu dari sejumlah bantuan, yang besarnya tergantung pada kondisi negara dan kebijaksanaan pembangunannya, dipergunakan untuk perbaikan atau peningkatan dalam infrastruktur, pendidikan, dan kelembagaan yang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali agak terbatas dan bersifat jangka panjang.

Di samping melalui studi yang bersifat makro dan karena berbagai hal tersebut di atas, maka dalam menganalisa bagaimana pengaruh dan hubungan timbal balik antara arus pemasukan modal, khususnya bantuan luar negeri, dengan pertumbuhan ekonomi dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan atau pengurangan kemiskinan, dan lain-lain perlu disertai pula dengan analisa yang menyangkut proyek. Dengan analisa ini akan terungkap dengan lebih jelas bagaimana pengaruh proyek-proyek bantuan luar negeri masing-masing dalam hubungan dengan aspek-aspek yang lebih luas.

Sehubungan dengan ini, Bank Dunia dalam laporannya akhir-akhir ini (World Development Report, 1985) dalam menilai pengaruh dan efektivitas bantuan luar negeri dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi, lebih menekankan analisisnya pada pengalaman empiris program dan bantuan luar negeri pada negara berkembang. Banyak negara-negara penerima bantuan, seperti Brazil, Columbia, Korea, Muangthai dan Indonesia, di samping hasil usaha pengelolaan pembangunan yang berjalan cukup baik, sebagai hasil dari bantuan luar negeri mereka telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan relatif telah cukup berhasil mengembangkan sektor swasta.

Demikian pula dari berbagai hasil studi sektoral dan proyek lainnya, dapat disimpulkan bahwa sungguhpun dampak bantuan luar negeri itu dapat berbeda antar negara maupun

antar waktu, akan tetapi bantuan itu pada umumnya minimal telah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara-negara penerima bantuan. Namun demikian besar kecilnya pengaruh dan peranan itu atas pembangunan banyak bergantung pula pada kerangka dan strategi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan serta kekuatan institusional yang terdapat di negara-negara penerima bantuan yang bersangkutan.



BAB IV

MODAL ASING DAN EKONOMI INDONESIA

4.1. Bantuan Luar Negeri

Bantuan atau pinjaman luar negeri bagi Indonesia yang secara teratur dan dalam jumlah yang besar telah berjalan sejak awal pemerintahan Orde Baru. Hal ini bermula pada bulan Desember 1966 melalui pertemuan internasional di Paris antara Indonesia dan negara-negara kreditor untuk mempelajari keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia serta untuk mempertimbangkan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian Indonesia. Pertemuan ini telah berhasil menyepakati penjadwalan kembali (rescheduling) kewajiban pembayaran hutang Indonesia yang telah terjadi selama masa Orde Lama yang jatuh tempo pada tahun 1966 dan 1967.¹

Selanjutnya negara-negara donor dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, yang dimotori oleh negara Belanda mengadakan pertemuan-pertemuan konsultatif secara terkoordinir untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan program-program stabilisasi dan rehabilitasi serta program-program pembangunannya. Konsorsium yang terbentuk sesama mereka ini melalui pertemuan-pertemuannya berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menyepakati tentang jumlah, bentuk,

¹Posthumus, G.A., The Inter-Governmental Group on Indonesia, Rotterdam University Press, 1971, hal. 132.

syarat-syarat dan pengaturan waktu dari bantuan keuangan bagi Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Inter-Governmental Group on Indonesia. Pertemuan pertama diadakan di Amsterdam pada bulan Februari 1967, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan atau urgensinya diadakan pertemuan-pertemuan secara periodik setiap tahun untuk mempelajari dan menilai program-program pembangunan Indonesia serta menetapkan secara bersama pinjaman atau bantuan tersebut. Hingga tahun 1987 sebagian besar (lebih dari 2/3 bagian) pinjaman pemerintah dari sumber luar negeri berasal dari program bantuan IGGI.

Pada dasarnya pemasukan modal dari luar negeri, khususnya berupa bantuan atau pinjaman luar negeri seperti yang dikemukakan di atas adalah sesuai dengan kehendak rakyat, bangsa dan negara, sebagaimana yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagaimana halnya dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan sebelumnya, di dalam GBHN 1983 dinyatakan bahwa pembangunan nasional Indonesia memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Pengerahan dari dana-dana investasi yang bersumber dari dalam negeri harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya akan mampu membiayai sendiri seluruh pengeluaran.

Sungguhpun dalam rangka mempelancar pembangunan nasional diperlukan pemasukan modal dari luar negeri dalam jumlah besar, tetapi baik yang berupa pinjaman luar negeri maupun penanaman modal asing, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam hubungan ini, khususnya mengenai bantuan luar negeri dalam GBHN dinyatakan bahwa pinjaman luar negeri akan dapat diterima sepanjang tidak akan membebankan dan dalam batas-batas kemampuan untuk pembayaran kembali. Dan disamping itu pinjaman tersebut haruslah untuk proyek-proyek produktif dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat pada umumnya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia sejak Repelita I yang lalu prinsip-prinsip kebijaksanaan yang digariskan dalam GBHN itu tetap menjadi dasar. Namun demikian, sesuai dengan perkiraan dan perhitungan secara makro, maka pertama-tama diperkirakan target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai dan kemudian sumber-sumber dalam negeri yang dapat dikerahkan untuk mencapai sasaran tersebut baik untuk Repelita maupun untuk rencana tahunannya yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Dengan berlandaskan pada pertimbangan dan perkiraan tersebut, maka secara makro dapat diketahui berapa besarnya kesenjangan kebutuhan tabungan (saving gap). Dengan demikian dapat diketahui berapa besarnya pemasukan modal khususnya bantuan luar negeri, yang diperlukan untuk menunjang pembangunan dalam mencapai target-target pertumbuhannya.

Dan pada sektor pemerintah, besarnya kebutuhan akan bantuan luar negeri itu tercermin dalam Repelita untuk lima tahun dan anggaran tahunannya.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa selama periode Repelita IV telah direncanakan laju pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai sebesar rata-rata lima persen. Jika dihitung dari data yang dikemukakan Hendra Esmara,² maka selama Repelita IV itu jumlah investasi keseluruhannya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 145,2 triliun, sedangkan jumlah tabungan dalam negeri diperkirakan hanya sebesar Rp 117,4 triliun. Ini berarti terdapat kesenjangan tabungan (saving gap) sebesar Rp 27,8 triliun, yaitu sebesar 19,1 persen dari jumlah kebutuhan investasi keseluruhannya. Dari segi devisa, selama periode tersebut diperkirakan kebutuhan devisa hanya sebesar Rp 184,6 triliun, sedangkan jumlah penerimaan devisa hanya sebesar Rp 147,9 triliun. Ini berarti terdapat kesenjangan kebutuhan devisa (foreign exchange gap) sebesar Rp 39,6 triliun, atau sebesar 21,2 persen dari jumlah kebutuhan devisa keseluruhannya. Sebagai akibat dari adanya sasaran pertumbuhan ekonomi serta devisa tersebut, maka selama periode Repelita IV itu diperlukan pemasukan modal sebesar US \$ 34,3 milyar, dimana US \$ 28,4 milyar dari padanya berupa pinjaman pemerintah.

²Hendra Esmara, "Mengkaji Kerangka Repelita IV: Masalah, Sasaran dan Kebijaksanaan, Makalah Panel Diskusi Harian Kompas, Jakarta 13-15 Februari 1984, hal. 3.

Sebagai hasil dari program-program pembangunan nasional yang ditunjang oleh bantuan luar negeri itu, Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonominya. Selama periode Repelita I telah dicapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 8,4 persen per tahun. Selanjutnya pada periode Repelita II kira-kira 7,1 persen. Repelita III kira-kira 6,1 persen dan Repelita IV kira-kira 4,6 persen per tahun. Dalam hubungan ini menurut Bank Dunia tahun 1980 Indonesia telah mencapai pendapatan per kapita sebesar US \$ 430 dan berhasil naik kelas dari kelompok negara-negara berpendapatan rendah menjadi kelompok negara-negara berpendapatan menengah. Namun demikian, ternyata bahwa perkembangan Repelita per Repelita terdapat sedikit penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun, terutama karena adanya resesi ekonomi dunia yang terjadi tahun 1974-1975 dan tahun 1980-1981 yang terasa akibatnya tahun-tahun kemudian.

Ditinjau dari sudut sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran pembangunan itu, sungguhpun dalam GBHN dinyatakan bahwa bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap, namun jumlahnya relatif besar pada tahun-tahun permulaan proses pembangunan semasa Orde Baru ini. Peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pemerintah pada periode Repelita I rata-rata 60,6 persen. Kemudian pada periode Repelita II turun menjadi rata-rata 34,7 persen, Repelita III turun lebih lanjut menjadi 29,9 persen dan pada periode Repelita

IV meningkat kembali menjadi rata-rata 40 persen per tahun dari jumlah pembiayaan pembangunan pemerintahan keseluruhannya.

Dihitung dari data-data realisasi dan rencana anggaran sejak awal Repelita III hingga tahun 1986/1987, misalnya ternyata bantuan yang bersumber yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 14,6 per tahun. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan sektor pemerintah rata-rata 8,6 persen per tahun. Dengan demikian, berhubung karena terbatasnya sumber dana dari dalam negeri, khususnya keterbatasan tabungan pemerintah, maka jumlah bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan sektor pemerintah menjadi semakin besar dan meningkat dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi (lihat Tabel IV - 1).

Dalam hal penggunaan bantuan luar negeri, khususnya berupa bantuan proyek yang diterima Indonesia, ternyata hampir semua sektor pembangunan memperoleh alokasi dana yang berasal dari luar negeri tersebut. Namun demikian atas dasar pertimbangan efisiensi dan produktivitas jangka panjang serta adanya fungsi pemerintah dalam melayani kebutuhan public utilities bagi masyarakat, maka sebagian besar bantuan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek dalam sektor prasarana perhubungan dan pariwisata, pelistrikan, prasarana pertanian dan irigasi, serta industri dan pertambangan. Jumlah dana bantuan proyek yang disalurkan kepada empat sektor pembangunan ini selama periode 1973/1974 - 1986/1987 mencapai

jumlah sebesar 74,5 persen dari seluruh bantuan proyek. Dan dari sudut pengeluaran pembangunan ternyata pula bahwa pada periode yang sama sebanyak 52,9 persen dari jumlah seluruh pembiayaan pembangunan pemerintah untuk empat sektor itu adalah berupa dana bantuan proyek yang bersumber dari luar negeri tersebut (lihat Tabel IV - 2).

Sebagai akibat dari meningkatnya jumlah bantuan luar negeri yang diterima Indonesia, sedangkan pelunasan utang total relatif masih lebih rendah, maka posisi pinjaman negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari data Bank Dunia ternyata bahwa pada akhir tahun 1987 US \$ 34.221,5 juta, dan jika termasuk yang belum dipergunakan tetapi sudah disetujui menjadi sebesar US \$ 51.312,0 juta.

Dalam menilai posisi utang, kewajiban pelunasan dan pengelolaannya, pertama-tama dapat ditinjau mengenai komposisi sumber pinjaman, di antaranya komposisi utang dari kreditor resmi dan kreditor swasta yang memberikan pinjaman. Di masa yang lalu Indonesia relatif lebih beruntung dalam memperoleh pinjaman, yang telah dipakai/belum dilunasi, karena relatif lebih banyak pinjaman yang bersumber dari kreditor resmi dengan syarat-syarat relatif lebih ringan. Sebagai ilustrasi, dari jumlah pinjaman yang dipakai dalam periode tahun 1984-1988, bagian pinjaman yang bersumber dari kreditor resmi untuk Indonesia berjumlah 59,1 persen. (Lihat Tabel IV-4).

TABEL IV - 1
 INDONESIA : ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGARA DAN BANTUAN LUAR NEGERI
 (miliar Rp)

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pembangunan	Tabungan Pemerintah	Defisit Anggaran	Bantuan Luar Negeri			% Bantuan Luar Negeri terhadap Pengeluaran Pembangunan
				IGGI**	Bantuan Program	Bantuan Proyek	
1967	-	-	-	200	-	-	-
1968	-	-	-	325	-	-	-
1969/70	118,2	28,4	97,8	569	25,7	78,5	88,2
1970/71	169,8	49,1	120,7	686	35,1	99,1	79,8
1971/72	195,9	73,3	122,6	646	37,3	109,2	74,8
1972/73	298,2	134,1	164,1	828	40,1	104,2	48,4
1973/74	451,8	228,9	222,1	859	32,2	295,7	72,7
1974/75	969,6	737,0	232,6	1.136	36,1	195,9	23,9
1975/76	1.397,7	909,3	488,4	1.138	20,2	471,4	35,1
1976/77	2.397,7	1.276,2	778,3	1.198	18,2	773,6	38,2
1977/78	2.156,8	1.386,5	773,3	1.416	35,8	737,6	35,8
1978/79	2.555,6	1.522,4	1.033,2	1.615	48,2	987,3	40,5
1979/80	4.016,1	2.635,8	1.381,1	1.993	64,8	1.316,3	34,4
1980/81	5.916,1	4.427,8	1.489,1	1.974	64,1	1.429,7	25,2
1981/82	6.948,1	5.235,8	1.705,1	1.827	45,1	1.663,9	24,6
1982/83	7.359,6	5.422,8	1.937,9	1.926	15,1	1.924,9	26,4
1983/84	9.699,1	6.828,9	3.878,2	2.240	14,9	3.867,5	39,2
1984/85	9.951,9	6.476,5	3.475,4	2.400	69,3	3.483,7	34,9
1985/86	10.873,1	6.278,9	4.594,2	2.405	78,9	4.297,2	48,2
1986/87	8.332,8	4.786,9	3.625,1	2.580	81,4	3.587,7	43,1
1987/88	9.479,8	5.967,1	3.512,7	3.161	98,5	3.989,6	42,2
1988/89	12.251,8	7.845,2	5.205,8	3.451	92,4	4.532,3	37,7

Catatan : *Termasuk saldo anggaran lebih

**Bantuan IGGI tahun 1967 dan 1968 merupakan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Ekonomi dan dinyatakan juta US \$.

Sumber : Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN, 1989/1990

TABEL IV - 2
 INDONESIA : ALOKASI PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAN
 BANTUAN PROYEK MENURUT SEKTOR, 1974/75 - 86/87

S e k t o r	Pengeluaran Dana		Bantuan Proyek		% Bantuan Proyek ter- hadap Penge- luaran Pem- angunan
	Rp milyar	%	Rp milyar	%	
1. Pertanian & Irigasi	10.214	14,2	2.387	9,7	23,2
2. Industri dan Pertambangan	7.981	11,1	5.533	22,5	69,3
3. Tenaga Listrik	6.400	8,9	5.344	21,7	83,5
4. Perhubungan & Pariwisata	10.005	13,9	5.039	20,5	50,4
5. Tenaga Kerja & Transmigrasi	3.490	4,8	518	2,1	14,8
6. Pembangunan	6.517	9,0	130	0,6	2,1
7. Pendidikan	8.045	11,2	1.183	4,8	14,7
8. Kesehatan	2.332	3,2	452	1,8	19,4
9. Perumahan dan Air Minum	2.037	2,8	595	2,4	29,2
10. Pelayanan Masya- rakat (Umum)	6.860	9,5	1.631	6,6	23,8
11. Partisipasi Modal Pemerintah ^{a)}	3.270	4,5	829	3,4	25,4
12. Lain-lain ^{b)}	4.998	6,9	930	3,8	18,6
Pengeluaran Pemba- ngunan	72.150	100,0	24.581	100,0	34,1

a) Hukum dan Ketertiban, Pertahanan dan Keamanan, dan Aparat
Pemerintah

b) Perdagangan dan Koperasi, Agama, Penerangan dan Ilmu
Pengetahuan.

Sumber : Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
1986/87.

TABEL IV - 3
 PERSETUJUAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN PELUNASAN PINJAMAN
 1973/1974 - 1985/1986
 (juta US \$)

Tahun	Pinjaman Pemerintah Total	Pinjaman Lunak	Pinjaman Setengah Lunak dan Komersial	Pinjaman Tunai	Pelunasan Pinjaman a)	Nilai Ekspor b)	% Pelunasan Pinjaman terhadap Ekspor
1973/74 Akhir							
Pelita I	858,8	858,8	--	--	131	2.546	5,1
1978/79 Akhir							
Pelita II	3.122,5	1.881,9	753,5	487,1	1.117	7.989	14,8
1979/80	3.688,5	2.319,2	911,3	458,8	1.327	13.146	10,1
1980/81	3.798,9	2.837,6	965,4	795,9	1.339	16.188	8,3
1981/82	5.425,0	1.863,8	3.213,2	348,8	1.629	13.931	11,7
1982/83	6.684,4	2.804,9	2.379,7	2.299,8	1.988	11.894	17,2
1983/84 Akhir							
Pelita III	4.528,6	2.245,1	985,8	1.378,5	2.188	12.738	17,2
1984/85	4.579,1	2.526,4	1.278,3	794,4	2.684	13.723	19,6
1985/86	5.351,4	2.473,9	1.813,3	1.864,2	3.278	12.298	26,6
Jumlah 1979/80 s/d 1985/1986	34.847,9	15.458,9	18.666,2	7.938,8	14.345	93.118	15,4
3 Bagian	188,8	45,4	31,3	23,3	42,1	273,5	--

Catatan : a) Pokok dan bunga pinjaman pemerintah
 b) Termasuk ekspor minyak bumi dan gas alam cair (LNG) atas dasar netto

Sumber : Republik Indonesia, Lampiran Pidato Keneqaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR, (Beberapa Tahun Penerbitan)

TABEL IV - 4

INDONESIA: PINJAMAN LUAR NEGERI BRUTO DAN PINJAMAN
PEMERINTAH/DIJAMIN PEMERINTAH *

	1984	1985	1986	1987	1988
<i>Pinjaman LN Bruto</i>	20.908	22.723	26.502	30.174	32.479
1. Pinjaman Jangka Panjang					
Total :	18.133	19.449	21.715	25.090	26.682
a. Pinjaman Pemerintah	14.971	15.870	17.515	21.690	22.883
b. Pinjaman Swasta	3.142	3.579	3.300	3.400	3.800
2. Pinjaman Jangka Pendek	2.775	3.374	4.787	4.639	5.384
3. Penggunaan Kredit IMF	0	0	0	445	413
<i>Pinjaman Jangka Panjang Pemerintah/Dijamin Pemerintah</i>					
1. Pinjaman yang dipakai/ belum dilunasi	14.971	15.870	17.515	21.690	22.883
2. Komitmen Baru	4.277	5.266	7.061	5.661	4.731
3. Pinjaman Baru yang dipakai	2.550	2.673	4.192	4.971	3.846
. Pembayaran Pokok Pinjaman	935	1.053	1.102	1.295	1.628
5. Aliran Masuk Modal Netto	1.615	1.620	3.090	3.676	2.219
6. Pembayaran Bunga Pinjaman	823	994	1.145	1.256	1.620
7. Pelunasan Hutang Total	1.759	2.047	2.247	2.551	3.247
<i>Pinjaman yang dipakai/belum dilunasi</i>					
1. Kreditor Resmi	9.506	10.057	11.112	12.039	12.835
a. Multilateral	1.834	2.253	2.069	2.136	3.343
- Bank Dunia (IBRD)	1.039	1.308	1.735	2.136	2.793
- I D A	566	632	707	763	812
b. Bilateral	7.673	7.806	8.242	8.562	8.491
2. Kreditor Swasta	5.465	5.813	7.403	9.649	10.048

Catatan: *) Juta US \$

Sumber : World Debt Tables: 1988-1989
(Washington D.C.: The World Bank), 1989.

Namun demikian dengan telah berhasilnya Indonesia naik kelas ke kelompok negara-negara berpendapatan menengah, maka pada tahun-tahun berikutnya Indonesia memperoleh pinjaman baru, khususnya dari kreditor resmi, dengan syarat-syarat lunak, setengah lunak dan komersial, menjadi relatif semakin berkurang. Akibatnya unsur hibah dari bantuan baru yang diperoleh Indonesia relatif telah semakin menurun, namun masih dalam tingkat yang cukup wajar. Sebagai ilustrasi, pada periode 1984-1988 unsur hibah pinjaman dari kreditor resmi bagi Indonesia rata-rata 12,7 persen, sedangkan unsur hibah pinjaman dari kreditor swasta untuk Indonesia rata-rata 0,3 persen. Namun demikian, karena Indonesia mempunyai reputasi yang cukup baik sebagai negara peminjam dan karena cukup besarnya kepercayaan pemberi pinjaman atas program-program pembangunannya, pada dasarnya Indonesia masih memperoleh pinjaman lunak dan setengah lunak relatif cukup banyak, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang dalam kondisi dan tingkat perekonomian yang setaraf (lihat Tabel IV - 5).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk menganalisa masalah dan resiko utang serta hubungan keuangan dengan luar negeri, maka dalam mengelola pinjaman luar negeri lazimnya diukur dengan berupa rasio. Pertama-tama dari segi rasio jumlah pinjaman terhadap ekspor. Menurut data Bank Dunia rasio tersebut untuk Indonesia pada tahun 1984 sebesar 103,2 persen dan pada tahun 1985 meningkat menjadi

114,5 persen. Angka ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang keseluruhannya yang pada tahun 1984 sebesar 138,6 persen. Dengan angka rasio yang belum mencapai atau belum melebihi 160 persen bagi Indonesia maka berarti negara kita belum lagi menghadapi masalah penjadwalan kembali hutang-hutangnya sesuai dengan patokan yang lazim tersebut.

Dalam hubungannya dengan pengendalian pinjaman dan beban pembayaran utangnya, Indonesia telah melakukan pengelolaannya secara terpadu dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, penanaman modal dan perdagangan. Untuk melakukan kebijaksanaan penyesuaian dalam rangka memperbaiki ekonomi dan mempertahankan momentum pembangunan, maka IMF dan Bank Dunia telah menyarankan beberapa resepnya bagi Indonesia yang dapat disimpulkan secara ringkas yaitu tetap bersikap hati-hati dalam melakukan pinjaman luar negeri, terus melakukan kebijaksanaan "pengencangan ikat pinggang", bekerja keras untuk meningkatkan ekspor non migas, meningkatkan efisiensi serta bersikap luwes dan tanggap dalam menghadapi keadaan ekonomi internasional yang selalu berubah.³

Dari pengalaman beberapa tahun belakangan ini rupanya pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijaksanaan pembangunan dan kebijaksanaan penyesuaian dalam kaitannya dengan pinjaman dan hubungan keuangan internasional yang

³Rustian Kamaluddin, "Bantuan Luar Negeri dan Beban Hutang yang Semakin Berat", Manajemen dan Usahawan Indonesia Agustus 1986, hal. 15.

TABEL IV - 5

INDONESIA: PINJAMAN JANGKA PANJANG PEMERINTAH
/DIJAMIN PEMERINTAH

	Satuan	1984	1985	1986	1987	1988
Konitaen Pinjaman Baru						
	Jutaan US \$	4.731	5.145	6.040	6.233	6.390
1. Kreditor Resai	sda	2.690	2.709	3.007	3.360	3.403
a. Multilateral	sda	1.777	1.921	2.242	2.435	2.602
- IDRD	sda	987	1.135	1.627	1.498	1.598
- I D A	sda	0	0	0	0	0
b. Bilateral	sda	913	872	765	925	801
2. Kreditor Swasta	sda	2.041	2.356	3.033	2.873	2.987
a. Leveransir	sda	301	405	554	375	431
b. Pasar Modal	sda	1.739	1.951	2.479	2.498	2.556
Syarat-syarat Pinjaman Baru						
1. Kreditor Resai						
a. Bunga Pinjaman	%	8,6	8,9	9,2	9,5	9,6
b. Jangka Waktu Pelunasan	tahun	21,0	24,4	24,4	20,9	20,5
c. Tenggang Aktu	tahun	6,0	6,1	5,6	5,6	6,8
2. Kreditor Swasta						
a. Bunga Pinjaman	%	9,8	9,8	9,1	8,8	9,1
b. Jangka Waktu Pelunasan	tahun	9,2	9,8	10,0	11,8	10,3
c. Tenggang Waktu	tahun	4,1	4,6	4,7	4,2	4,1
d. Unsur Hibah	%	0,5	- 9,3	1,1	3,9	5,0

Sumber : World Debt Tables: 1988-1989
(Washington D.C.: The World Bank), 1990.

sejalan dengan apa yang disarankan oleh IMF dan Bank Dunia tersebut. Hal ini tercermin dari peraturan, tindakan dan kebijaksanaan pemerintah, berupa: devaluasi dan penyesuaian kurs valuta asing, penghematan anggaran belanja negara melalui penghematan subsidi-subsidi, peningkatan ekspor non migas dengan cara meningkatkan daya saing dan menekan ekonomi biaya tinggi, peningkatan penanaman modal khususnya modal asing dengan memberikan fasilitas dan rangsangan, usaha peningkatan efisiensi dan produktivitas pada berbagai sektor perekonomian, dan sebagainya.

4.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam upaya menggalakkan investasi di Indonesia dan agar keberadaan investasi itu dapat berlaku efektif maka telah dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada bulan Januari 1967. Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini menawarkan paket intensif berupa fiskal dan bea yang bertujuan meningkatkan keuntungan investasi swasta.

Di samping itu, untuk menarik minat para investor, khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka pemerintah pada bulan Mei 1986 telah mengeluarkan serangkaian paket kebijaksanaan yang merangsang penanaman modal asing melalui :

1. Pembebasan atau pengembalian bea masuk komoditas yang diimpor oleh produsen eksportir, eksportir bukan produsen, dan pengusaha yang melaksanakan proyek pemerintah. (PP. No. 21/1986).

2. Pengaturan Kawasan Berikat (PP. No. 22/1986).
3. Perpanjangan izin dan perluasan usaha dari perusahaan penanaman modal asing (PP. No. 24/1986).

Pada bulan bulan Desember 1987 pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijaksanaan baru (paket kebijaksanaan 24 Desember) yang membenarkan perusahaan penanaman modal asing yang sudah beroperasi melaksanakan ekspor hasil produksinya sendiri dan hasil produksi perusahaan lain (PP. No. 24/1987). Perlakuan yang sama dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing yang minimal 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional atau minimal 45 persen sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional di mana 20 persen dari seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama perusahaan dalam negeri (Keppres. No. 50/1987). Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 bersama-sama dengan paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 telah menyebabkan melonjaknya jumlah investasi yang disetujui pemerintah.

Dengan berbagai upaya dan kebijaksanaan yang diterapkan pemerintah, maka kegiatan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi salah satu komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya peranan investasi domestik bruto terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto sejak tahun 1969 hingga 1988.

Oleh karena itu, jika investasi dalam negeri tidak ingin dihambat dan apabila Indonesia ingin menarik investasi asing di masa yang akan datang, maka diperlukan usaha-usaha untuk memperlancar proses investasi tersebut.

Untuk itu, ada keinginan besar dari pihak pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga berdirilah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada bulan Juni 1973 dan merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain dari pada itu, jika kita memperhatikan jumlah penanaman modal asing di Indonesia menunjukkan angka yang rendah pada tahun-tahun pertama dasawarsa tujuh puluhan, tetapi kemudian memperlihatkan arah perkembangan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya walaupun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penanaman modal asing menurut Pelita menunjukkan bahwa pada Pelita I berjumlah Rp 779,5 milyar, meningkat menjadi Rp 1.536,3 milyar pada Pelita II. Angka tersebut kembali meningkat pada Pelita III hingga menjadi Rp 6.125,6 milyar dan Pelita IV sebesar Rp 13.475,4 milyar (lihat Tabel IV - 6).

Selanjutnya, situasi politik dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam negeri sering menciptakan iklim berusaha yang kurang menguntungkan pada investor asing. Stabilitas politik yang kurang mapan menyebabkan terlalu besarnya rasio kehilangan modal yang telah ditanamkan dan resiko untuk tidak memperoleh laba yang diharapkan. Kebijakan ekonomi

yang telah membatasi ruang gerak para investor dan memberi peluang yang terlalu besar kepada campur tangan pemerintah dalam usaha juga akan menyebabkan berkurangnya aliran investasi. Demikian pula peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang kurang/tidak memperhatikan pemberian insentif kepada para penanam modal atau investor, juga akan mempunyai dampak yang sama.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa investasi asing telah merosot selama periode tahun 1984-1986. Pada tahun sebelumnya (1983) jumlah investasi asing yang disetujui mencapai Rp 2.461,7 milyar sebagai akibat banyaknya investor yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir untuk memperoleh pembebasan pajak (Tax Holiday). Mulai tahun 1984 penanaman modal asing turun hingga mencapai Rp 1.191,1 milyar. Namun setelah dikeluarkan berbagai paket kebijaksanaan seperti paket 6 Mei 1986 dan paket 24 Desember 1987 nampak bahwa jumlah penanaman modal asing meningkat menjadi Rp. 1.367,7 milyar pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1987 angka tersebut melonjak menjadi Rp 2.406,7 milyar. Pada tahun 1988 penanaman modal asing kembali menunjukkan kenaikan hingga menjadi Rp 7.538,6 milyar.

Laju pertumbuhan yang dihitung berdasarkan Pelita menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penanaman modal asing sebesar 34,5 persen. Namun, Pelita II sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 25,4 persen. Kemudian pada Pelita III kembali hingga menjadi 29,4 persen (lihat tabel IV - b).

TABEL IV - 6
PENANAMAN MODAL ASING
(Miliar Rp.)

Tahun	Penanaman Modal Asing	Pertumbuhan (%)
1969	185,3	-
1970	112,7	-0,39
1971	144,8	20,9
1972	116,1	19,8
1973	220,6	90,0
Pelita I	779,5	34,5
1974	394,4	70,8
1975	596,1	51,4
1976	156,7	-73,7
1977	137,6	-12,2
1978	251,5	82,8
Pelita II	1.536,3	25,4
1979	1.296,4	451,5
1980	554,5	-57,2
1981	600,9	8,4
1982	1.212,1	101,9
1983	2.461,7	103,1
Pelita III	6.125,6	121,5
1984	1.191,1	-51,6
1985	971,3	18,5
1986	1.367,3	40,8
1987	2.406,7	76,0
1988	7.538,6	213,2
Pelita IV	13.475,4	59,4

Sumber : IMF dalam hal Hill, Foreign Investment and industrialization in Indonesia, Oxford Univ. Press Singapore, 1989, hal. 35.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing meskipun mengalami fluktuasi dari pelita ke pelita namun secara umum dapat dikatakan telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan pemerintah untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya diberbagai sektor ekonomi, dengan menyediakan berbagai macam insentif dan memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para investor.

Pembagian penanaman modal menurut sektor ekonomi penting artinya untuk mengetahui apakah modal yang diinvestasikan selama ini hanya terpusat pada sektor industri. Berdasarkan Tabel IV - 7, pada Pelita I jumlah investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian sebanyak 77 proyek dengan modal sebesar Rp 80,7 milyar, sedangkan sektor industri sebanyak 270 proyek dengan modal sebesar Rp 395,7 milyar. Pada Pelita II dan III nampaknya mengalami penurunan, yaitu masing-masing 29 dan 24 proyek dengan modal masing-masing sebesar Rp 84,1 milyar dan Rp 276,4 milyar. Jika kita memperhatikan dengan seksama, maka nampak dengan jelas bahwa jumlah proyek yang disetujui mengalami penurunan sedangkan modal yang ditanam mengalami peningkatan. Selanjutnya dalam Pelita IV jumlah proyek kembali meningkat menjadi 35 buah, sedangkan modal yang ditanamkan sebesar Rp 594 milyar.

Investasi di bidang konstruksi menempati urutan ketiga setelah industri dan pertanian. Pada Pelita I jumlah proyek di bidang ini sebanyak 37 buah dengan modal sebesar

TABEL IV - 7

PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING
MENURUT SEKTOR EKONOMI¹⁾
(miliar Rp.)

Tahun	T o t a l		Pertanian		Pertambangan		Industri	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
1969	180	185,5	18	24,1	4	185,4	68	38,6
1970	186	112,7	34	26,1	1	28,7	58	51,1
1971	82	144,8	7	3,7	4	32,9	54	81,9
1972	62	116,1	8	7,9	-	28,8	41	68,5
1973	97	228,6	18	18,9	-	8,1	57	155,6
Pelita I	447	779,5	77	88,7	9	187,1	278	395,7
1974	67	394,4	6	9,8	-	29,2	43	388,8
1975	31	596,1	1	4,8	-	218,6	22	352,4
1976	38	156,7	2	11,5	-	4,5	22	121,1
1977	26	137,6	11	21,8	2	8,2	13	183,1
1978	34	251,5	9	37,8	-	24,1	19	178,8
Pelita II	188	1.536,3	29	84,1	2	268,6	119	1.862,6
1979	22	1.296,4	5	63,1	-	221,2	13	958,4
1980	26	554,5	5	58,1	-	1,9	16	449,2
1981	35	688,9	10	68,9	3	28,8	18	466,9
1982	35	1.212,1	3	54,2	3	153,9	22	821,8
1983	28	2.461,7	1	32,1	1	18,9	33	2.142,3
Pelita III	138	6.125,6	24	276,4	7	424,7	182	4.838,6
1984	24	1.191,1	1	8,2	-	--	17	1.877,7
1985	49	971,3	5	23,2	-	--	24	777,7
1986	58	1.367,7	18	214,9	-	--	27	888,4
1987	138	2.486,7	5	228,2	68	--	43	1.487,7
1988	145	7.538,6	14	135,5	-	--	181	6.587,6
Pelita IV	398	13.475	35	594,8	68	--	212	18.658,5

Catatan : 1) Telah dikurangi proyek yang dicabut izin usahanya dan beralih menjadi PMDN

Sumber : Buletin Statistik Indonesia, berbagai seri.

TABEL IV - 7

PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING
MENURUT SEKTOR EKONOMI (%)
(miliar Rp.)

Tahun	Konstruksi		Perdagangan/Hotel		Perdag/Komunikasi		Jasa - Jasa	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
(1)	(6)		(7)		(8)		(9)	
1969	3	1,8	4	2,7	3	0,1	9	12,7
1970	5	2,1	2	1,4	-	-	6	3,3
1971	8	2,1	2	21,7	4	0,8	3	1,5
1972	5	3,9	3	12,4	1	1,2	3	2,3
1973	18	5,8	1	18,5	4	6,5	7	23,2
<i>Pelita I</i>	39	15,7	12	48,7	12	8,6	28	43,8
1974	11	5,3	1	7,0	-	1,0	6	34,1
1975	4	3,6	-	9,8	2	7,3	2	9,2
1976	2	1,2	1	5,5	1	--	2	11,0
1977	-	1,8	-	2,9	-	--	-	8,5
1978	4	3,4	-	6,1	-	--	2	2,8
<i>Pelita II</i>	21	14,5	2	30,5	3	18,1	12	65,6
1979	1	0,3	-	1,9	-	--	3	28,6
1980	2	4,9	1	24,5	1	15,8	-	--
1981	1	31,4	-	--	-	--	1	4,9
1982	1	27,2	1	13,3	-	12,4	5	141,8
1983	8	73,7	2	17,5	-	0,3	5	188,8
<i>Pelita III</i>	13	137,5	4	57,2	1	28,5	14	283,3
1984	2	18,3	2	98,4	-	4,5	-	-
1985	9	138,3	-	--	-	-	1	32,7
1986	10	107,1	-	--	1	115,9	2	41,4
1987	7	69,7	5	323,7	1	351,8	9	33,5
1988	5	4,1	14	814,5	-	4,2	11	72,8
<i>Pelita IV</i>	33	337,5	21	1.223,6	2	476,4	23	188,4

Catatan : 1)Telah dikurangi proyek yang dicabut izin usahanya dan beralih menjadi PMDN

Suaber : Buletin Statistik Indonesia, berbagai seri.

Rp 15,7 milyar. Pada Pelita berikutnya jumlah proyek mengalami penurunan sedangkan modal mengalami peningkatan. Jumlah proyek pada Pelita II sebanyak 21 buah dengan modal sebesar Rp 14,5 milyar. Kemudian menurun lagi pada Pelita III sebanyak 13 buah proyek, sedangkan modal yang ditanamkan meningkat dengan pesat sehingga mencapai Rp 137,5 milyar. Namun pada Pelita IV jumlah proyek mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan modal. Jumlah proyek pada saat itu adalah sebanyak 31 buah dengan modal sebesar Rp 337,5 milyar.

Dari gambaran tersebut di atas, maka nampak bahwa sektor industri paling cepat mengalami peningkatan. Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 40 persen, di mana pertumbuhan yang pesat tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk memajukan sektor industri, dan sering pula dikatakan bahwa ukuran maju tidaknya suatu pembangunan ekonomi diukur dari seberapa besar sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini sering juga dikaitkan dengan proses tinggal landas suatu negara.

4.3. Arus Masuk Modal Asing

Perbandingan antara perkembangan lalu lintas barang dan jasa dengan lalu lintas modal menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia hampir seluruhnya ditutupi dengan pemasukan modal pemerintah. Pemasukan modal ini terdiri dari pinjaman IGGI maupun pinjaman lunak lainnya. Adapun peran modal swasta relatif sangat kecil. Sampai saat ini

dapat dikatakan perkembangan pemasukan modal pemerintah dan swasta seiring dengan defisit transaksi berjalan (lihat Tabel IV-8)

Kita diamati pemasukan modal pemerintah yang terdiri dari pinjaman luar negeri, investasi asing, portopolio, Indonesia sebenarnya menjadi importir modal. Arus masuk modal asing selama periode tahun 1969-1980 ditunjukkan dalam Tabel IV - 9. Modal asing yang masuk ke Indonesia dalam tabel ini adalah modal asing setelah dikurangi cicilan hutang, pembayaran-pembayaran lain yang tercantum dalam perkiraan modal dan disinvestasi yang terjadi setelah memperhitungkan pos kesalahan dan selisih yang belum diperhitungkan (errors dan omissions).

Jika dilihat dari nilai nominalnya, arus modal asing yang masuk ke Indonesia seperti yang ditunjukkan dalam Tabel IV - 9, mencerminkan suatu fluktuasi yang tidak menggambarkan suatu trend yang stabil. Pada tahun 1969, nilai arus masuk modal asing sebesar Rp 105,210 milyar, kemudian meningkat terus hingga mencapai Rp 342,720 milyar pada tahun 1973. Dua tahun berikutnya terjadi penurunan, setelah itu dapat dikatakan terjadi situasi yang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, jika kita perhatikan tabel tersebut, pernah terjadi arus modal ke luar pada tahun 1974 dan 1980.

TABEL IV - B
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
(Juta US\$)

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
A. Transaksi Sedang Berjalan	-285	-318	-371	-335	-476	597	-1188	-989	-46	-1487	976
Neraca Perdagangan	75	57	81	347	551	2631	1419	1796	3287	2689	5898
Pendapatan Investasi	-127	-133	-172	-347	-629	-1329	-1385	-1212	-1685	-1997	-2465
Pengangkutan dan Biaya Berkaitan	-133	-147	-168	-188	-339	-657	-818	-1068	-1117	-1156	-1278
Transfer Lain - lain	31	66	46	51	55	49	27	15	25	14	38
Lain - lain	-237	-153	-166	-198	-144	-97	-357	-582	-556	-877	-1289
B. Lalu lintas Modal	311	293	436	656	737	485	354	1995	1182	1698	868
Investasi modal Asing	36	83	139	287	15	-49	476	344	235	276	226
Investasi Fotofolio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modal Swasta	8	6	4	169	285	-87	-2181	-184	-226	24	-658
Modal Pemerintah	267	284	293	288	517	541	2859	1835	1893	1291	1239
C. Cadangan (termasuk pos-pos SDR)	15	-12	1	-487	-339	-588	668	-983	-999	-158	-1585
D. Kesalahan dan Selisih yang belum diperhitungkan.	-95	-6	94	56	77	-314	-184	-182	-55	-133	-483

Catatan : Tanda negatif menunjukkan debit

Sumber : IMF, Balance of Payments, berbagai terbitan.

Sambungan tabel IV - 8

TABEL IV - 8
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
(Juta US\$)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
A. Transaksi Sedang Berjalan	3084	- 614	-5335	-6295	-2112	-1638	-4899	-2269	-1552
Neraca Perdagangan	9162	6779	1888	1813	5495	5874	2458	4674	5678
Pendapatan Investasi	-3327	-4162	-4020	-4268	-4398	-4753	-3508	-3652	-3315
Pengangkutan dan Biaya Berkaitan	-1715	-2281	-2377	-2313	-1981	-1698	-1588	-1718	-1976
Transfer	200	258	134	184	115	171	185	187	211
Lain - lain	-1316	-1288	- 968	- 839	-1423	-1224	-1742	-1588	-954
B. Lalu lintas Modal	1326	1876	3611	6843	3412	1981	4365	3652	6771
Investasi modal Asing	188	133	226	289	227	256	341	1457	4218
Investasi Fotofolio	47	47	315	373	--	--	-35	--	--
Modal Swasta	-839	28	1482	1523	457	185	1291	765	912
Modal Pemerintah	1938	1668	3668	3858	2728	1495	2688	1438	1641
C. Cadangan (termasuk pos-pos SDR)	-2488	374	1846	-287	-988	-471	554	-218	321
D. Kesalahan dan Selisih yang belum diperhitungkan.	-1987	-1694	-2121	463	-392	282	-818	-173	-1141

Catatan : Tanda negatif menunjukkan debit

Sumber : IMF, Balance of Payments, berbagai terbitan.

TABEL IV - 9
 ARUS MASUK MODAL ASING
 (Miliar Rp)

Tahun	Arus Masuk Modal Asing
1969	105,210
1970	123,000
1971	155,400
1972	311,220
1973	342,720
1974	(-3,810)
1975	185,610
1976	765,270
1977	440,370
1978	986,950
1979	335,020
1980	(-327,620)
1981	154,330
1982	2.414,870
1983	6.467,740
1984	3.248.050
1985	2.377,950
1986	4.262,660
1987	4.711,510
1988	3.437,670

Sumber : diolah dari data yang dimuat dalam International Monetary Fund (IMF), Balance of Payments (berbagai tahun) dan World Bank, "Indonesia : strategy for Economic Recovery" Washington, D.C, May 1989.



Ada beberapa alasan pokok yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hal tersebut. *Pertama* ialah terjadinya lonjakan keuntungan yang diperoleh investor asing di sektor minyak bumi sebagai akibat terjadinya lonjakan dratis dalam harga minyak bumi di pasaran internasional sejak tahun 1873. Lonjakan dratis harga minyak bumi terjadi pada tahun 1974, 1979, 1980 dan lonjakan yang paling tinggi pada tahun 1981. Lonjakan drastis dalam harga minyak bumi ini telah diiringi dengan lonjakan tinggi dalam keuntungan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di sektor migas. Keuntungan yang melonjak ini kemudian dirépatiasi ke luar negeri. Sebab yang *kedua* adalah kemungkinan terjadinya tingkat keuntungan yang sangat tinggi yang juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing di luar sektor migas sebagai akibat mampu mereka melakukan penetrasi pasar secara intensif di bawah lindungan proteksi tarif dan non tarif yang dilakukan dalam rangka program industrialisasi substitusi impor. Sebab yang terakhir yang dapat dikemukakan ialah penggunaan sumber-sumber keuangan lokal oleh perusahaan-perusahaan asing dalam melakukan ekspansi operasinya. Keuntungan rupiah yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pembiayaan rupiah ini kemudian dikonversikan ke dalam valuta asing dan ditransfer ke luar negeri.

Dalam konteks yang lebih luas yang mencakup keseluruhan sistem neraca pembayaran, penulis kemukakan pula di sini perhitungan mengenai persediaan sumber pembiayaan yang diperoleh Indonesia dari kegiatan hubungan ekonomi luar

negerinya (ekspor-impor, transaksi jasa dan transaksi modal dengan pihak luar negeri) dan saldo keuangan bersih dari kegiatan internasional ini (net financial balance of international transaction). Dalam Tabel IV - 10 kolom terakhir ditunjukkan bahwa persediaan sumber pembiayaan hasil transaksi luar negeri yang diperoleh Indonesia selama periode tahun 1969 - 1988 setiap tahunnya adalah positif. Setelah memperhitungkan pembayaran-pembayaran ke luar negeri seperti yang tercantum dalam perkiraan sedang berjalan, maka kita peroleh saldo keuangan bersih dari kegiatan internasional seperti dimuat dalam Tabel IV - 11 kolom terakhir. Angka ini menunjukkan perubahan yang terjadi dalam cadangan alat pembayaran luar negeri (foreign exchange reserve). Angka-angka ini tidak seluruhnya positif. Angka yang positif menunjukkan bertambahnya cadangan alat pembayaran luar negeri sedangkan angka yang negatif menunjukkan berkurangnya cadangan alat pembayaran luar negeri. Oleh karena jumlah nilai positif lebih besar dari pada nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode tahun 1969-1988 kegiatan internasional ekonomi Indonesia telah menghasilkan neraca pembayaran yang secara kumulatif positif. Perlu dijelaskan di sini, bahwa angka-angka yang positif dalam kolom terakhir Tabel IV - 11 dinyatakan negatif dalam neraca pembayaran sedangkan sebaliknya angka-angka yang negatif dinyatakan positif untuk menunjukkan perubahan posisi cadangan alat-alat pembayaran luar negeri.

TABEL IV - 10

PERSEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN HASIL TRANSAKSI
LUAR NEGERI
(Miliar Rp)

Tahun	Saldo Perdagangan plus Pembayaran Jasa dan Transfer yang Diterima (1)	Arus masuk Modal Asing*) (2)	Persediaan Sumber Pem- biayaan Hasil Transaksi LN (1) + (2)
1969	51,700	105,210	156,910
1970	53,090	123,000	176,090
1971	65,100	155,400	220,500
1972	186,060	311,220	497,280
1973	293,100	342,720	635,820
1974	1.218,450	(- 3,810)	1.214,640
1975	666,130	185,610	851,740
1976	830,210	763,270	1.593,480
1977	1.463,820	440,370	1.904,190
1978	1.844,590	986,950	2.831,540
1979	3.998,790	335,020	4.333,810
1980	6.215,960	(-327,620)	5.888,340
1981	5.509,650	154,330	5.663,980
1982	2.453,620	2.414,870	4.868,490
1983	2.320,280	6.467,740	8.788,020
1984	7.566,590	3.248,050	10.814,640
1985	8.587,970	2.377,950	10.965,920
1986	4.375,220	4.262,660	8.637,880
1987	7.896,730	4.711,510	12.608,240
1988	10.184,320	3.437,670	13.621,990

Catatan : *)Setelah dikurangi cicilan pokok hutang, pembayaran lain dan perkiraan modal dan di investasi.

Sumber : International Monetary Fund (IMF), Balance of Payments (berbagai tahun).

TABEL IV - 11

PENGGUNAAN PERSEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN
HASIL TRANSAKSI LUAR NEGERI
(Miliar Rp.)

Tahun	Persediaan Pembiayaan Hasil Tran- saksi Luar Negeri	Pos-Pos Dalam Transaksi Sedang Berjalan				Saldo Bersih Transaksi Luar Negeri	
		Pengapalan dan Biaya yang Ber- kaitan	Perjalanan	Pendapatan Investasi	Pembayaran Atas Jasa-jasa Teknis & Jasa- jasa Lainnya		
1969	156,910	- 51,020	- 5,300	- 40,610	- 42,120	- 147,13	9,780
1970	196,090	- 56,150	- 7,260	- 50,810	- 57,300	- 171,52	4,570
1971	220,500	- 67,200	- 15,120	- 72,240	- 66,360	- 220,92	- 0,420
1972	497,200	- 78,960	- 10,060	- 145,740	- 83,500	- 326,34	170,940
1973	635,820	- 142,560	- 23,970	- 264,510	- 62,240	- 493,20	142,540
1974	1.214,640	- 270,060	- 36,020	- 562,460	- 80,450	- 965,79	240,850
1975	851,740	- 340,910	- 37,000	- 582,920	- 171,300	- 1.133,01	- 281,270
1976	1.593,400	- 423,530	- 56,840	- 510,250	- 222,710	- 1.213,33	380,150
1977	1.904,190	- 470,260	- 55,150	- 709,390	- 240,810	- 1.403,61	420,580
1978	2.831,540	- 732,770	- 171,700	- 1.265,050	- 566,050	- 2.736,46	95,080
1979	4.333,010	007,050	- 231,360	- 1.550,100	- 705,090	- 3.302,40	951,330
1980	5.000,340	- 1.006,790	- 254,110	- 2.100,320	- 862,470	- 4.311,69	1.576,650
1981	5.663,900	- 1.415,350	- 307,120	- 2.676,370	- 1.425,640	- 5.904,40	- 240,500
1982	4.860,490	- 1.644,740	- 390,950	- 2.701,600	- 1.320,520	- 6.145,01	- 1.277,320
1983	8.700,020	- 2.299,400	- 520,920	- 4.234,910	- 1.526,970	- 8.502,20	205,020
1984	10.014,640	- 2.045,230	- 540,690	- 4.731,600	- 2.512,160	- 9.837,76	976,000
1985	10.965,920	- 1.919,990	- 630,950	- 5.374,410	- 2.507,900	- 10.433,34	532,500
1986	8.637,000	- 2.403,100	- 710,120	- 5.793,900	- 2.003,710	- 11.070,03	- 3.232,950
1987	12.600,290	- 2.824,410	- 701,340	- 6.032,010	- 2.700,070	- 12.425,03	102,460
1988	13.621,990	- 3.417,250	- 890,050	- 5.732,090	- 1.649,030	- 11.690,02	1.931,970

Sumber : International Monetary Fund (IMF),
Balance of Payments, (Berbagai tahun).

Dalam konteks sistem neraca pembayaran secara keseluruhan, Indonesia memperoleh tambahan sumber-sumber ekonomi. Ini berlainan dengan apa yang dikemukakan sebelumnya dalam konteks transaksi yang hanya mencakup arus masuk modal asing dengan arus pembayaran ke luar negeri. Tetapi perlu juga dikemukakan di sini bahwa posisi arus penambahan sumber-sumber pembiayaan dalam konteks totalitas neraca pembayaran terbentuk setelah memperhitungkan proses ekonomi di dalam negeri yang telah menghasilkan ekspor. Oleh karena proses ekonomi di dalam negeri yang telah menghasilkan ekspor banyak digerakkan oleh modal asing, maka dalam konteks neraca pembayaran secara keseluruhan nampak peranan positif modal asing dan kegiatan asing, yaitu peranannya dalam turut serta menghasilkan ekspor. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam peranan positif modal asing dan kegiatan asing dalam menghasilkan ekspor telah dibayar cukup mahal oleh ekonomi Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel IV - 12. Setiap tahunnya pembayaran kepada pihak luar negeri mengalami peningkatan. Bahkan pernah terjadi pembayaran kepada pihak luar negeri lebih besar dari pada sumber pembiayaan hasil transaksi luar negeri, yaitu pada tahun 1971, 1975, 1982 dan 1985.

Sebagaimana besar dari penggunaan persediaan alat pembayaran luar negeri yang diperoleh Indonesia dari kegiatan luar negerinya telah dialokasikan untuk melakukan pembayaran kepada pihak asing dalam bentuk biaya pengiriman dan transpor lainnya, bunga hutang luar negeri,

perjalanan, keuntungan yang ditransfer ke luar negeri oleh investor asing dan pembayaran jasa-jasa teknis dan jasa-jasa lainnya seperti yang ditunjukkan dalam Tabel IV - 12. Selama periode tahun 1969 - 1988, dalam setiap tahunnya secara rata-rata hampir 90 persen dari persediaan sumber pembiayaan hasil transaksi luar negeri Indonesia telah dibayarkan kepada pihak asing. Disinilah kita lihat betapa mahal biaya yang kita bayar kepada pihak asing dalam menghasilkan penerimaan dari kegiatan ekonomi luar negeri Indonesia. Oleh karena pos pos pembayaran kepada pihak asing merupakan faktor utama yang telah menimbulkan defisit dalam perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran (current account deficits seperti nampak pada Tabel IV - 13, dan defisit ini dibiayai oleh modal asing (investor asing dan hutang luar negeri), maka sebenarnya Indonesia menggunakan modal untuk membiayai pihak asing dalam meraih keuntungan dan penerimaan dari Indonesia.

Aspek lain yang perlu juga penulis kemukakan di sini ialah daya beli sumber-sumber pembiayaan luar negeri yang telah diterima Indonesia selama ini, yaitu berapa besar kapasitas impor (import capacity) sumber-sumber pembiayaan luar negeri ini.

Nilai riil sumber-sumber pembiayaan luar negeri menunjukkan sampai seberapa jauh telah terjadi peningkatan daya dukungnya secara nyata terhadap proses pembangunan ekonomi nasional, yaitu kekuatan riilnya dalam membiayai impor.

TABEL IV - 12

PERSEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN HASIL TRANSAKSI LUAR NEGERI
DAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK LUAR NEGERI
(Miliar Rp)

Tahun	Persediaan Sumber pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri (A)	Jumlah Pembayaran Kepada Pihak Luar Negeri [§] (B)	persentase (B) terhadap (A)
1969	156,910	- 147,130	93,8
1970	176,090	- 171,520	97,4
1971	220,500	- 220,920	100,2
1972	497,280	- 326,340	65,6
1973	635,820	- 493,280	77,6
1974	1.214,640	- 965,790	79,5
1975	851,740	- 1.133,010	133,0
1976	1.593,480	- 1.213,330	76,1
1977	1.904,190	- 1.483,330	77,9
1978	2.831,540	- 2.736,460	95,6
1979	4.333,810	- 3.382,480	78,0
1980	5.888,340	- 4.311,690	73,2
1981	5.663,980	- 5.904,480	104,2
1982	4.868,490	- 6.145,810	126,2
1983	8.788,020	- 8.582,200	97,7
1984	10.814,640	- 9.837,760	91,0
1985	10.965,920	-10.433,340	95,1
1986	8.627,880	-11.870,830	137,4
1987	12.608,290	-12.425,830	98,6
1988	13.621,990	-11,690,020	85,8

Catatan : §) Terdiri dari pembayaran untuk pengapalan dan biaya yang berkaitan, perjalanan, pendapatan investasi dan pembayaran atas jasa-jasa teknik dan jasa-jasa lain.

Sumber : Diolah dari Tabel IV - 11.

TABEL IV - 13
 PERSEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN HASIL TRANSAKSI LUAR NEGERI
 DAN DEFISIT TRANSAKSI SEDANG BERJALAN
 (Miliar Rp)

Tahun	Persediaan Pembiayaan Hasil Tran- saksi Luar Negeri	Defisit Transaksi Sedang berjalan (*)	Pos-pos yang Menimbulkan Defisit Dalam Transaksi Sedang Berjalan			
			Pengapalan & Biaya yang Ber- kaitan	Perjalanan	Pendapatan Investasi	Peabayaran Atas Jasa-jasa Teknis & Jasa- jasa Lainnya
1969	156,910	- 109,140	- 51,020	- 5,300	- 48,610	- 42,120
1970	196,090	- 118,420	- 56,150	- 7,260	- 50,010	- 57,300
1971	226,900	- 155,820	- 67,200	- 15,120	- 72,240	- 66,360
1972	497,280	- 140,700	- 78,960	- 18,060	- 145,740	- 83,580
1973	635,820	- 200,170	- 142,560	- 23,970	- 264,510	- 62,240
1974	1.214,640	- 252,660	- 278,060	- 36,820	- 562,460	- 88,450
1975	851,740	- 466,340	- 348,910	- 37,800	- 582,920	- 171,300
1976	1.593,480	- 382,690	- 423,530	- 56,840	- 510,250	- 222,710
1977	1.904,190	- 193,660	- 478,260	- 55,150	- 709,390	- 248,010
1978	2.831,540	- 891,870	- 732,770	- 171,700	- 1.265,860	- 566,050
1979	4.333,810	- 616,950	- 887,850	- 231,360	- 1.558,180	- 785,090
1980	5.888,340	- 1.983,630	- 1.886,790	- 254,110	- 2.188,320	- 862,470
1981	5.663,980	- 394,830	- 1.415,350	- 387,120	- 2.676,370	- 1.425,640
1982	4.868,490	- 3.691,500	- 1.644,740	- 390,950	- 2.781,600	- 1.328,520
1983	8.788,020	- 6.257,990	- 2.299,400	- 520,920	- 4.234,910	- 1.526,970
1984	10.814,640	- 2.272,240	- 2.045,230	- 548,690	- 4.731,600	- 2.512,160
1985	10.965,920	- 1.843,110	- 1.919,990	- 638,950	- 5.374,410	- 2.587,980
1986	8.637,880	- 6.785,480	- 2.483,100	- 718,120	- 5.793,900	- 2.883,710
1987	12.608,290	- 3.747,710	- 2.824,410	- 781,340	- 6.832,810	- 2.788,070
1988	13.621,990	- 2.683,990	- 3.417,250	- 890,050	- 5.732,890	- 1.649,830

Catatan : (*) Angka yang positif menunjukkan surplus.

Sumber : Tabel IV - 11, International Monetary Fund,
 Balance of Payments, World Bank dan Bank Indonesia.

Tabel IV - 14 menunjukkan perkembangan kapasitas impor sumber-sumber pembiayaan luar negeri Indonesia selama periode tahun 1969 - 1988 diukur dengan harga impor tahun 1973 sebagai tahun dasar. Tabel IV - 14 ini juga menunjukkan bahwa inflasi di negara-negara sebagai sumber impor yang dilakukan Indonesia secara umum telah mengurangi daya beli sumber-sumber pembiayaan luar negeri Indonesia. Demikian juga keadaannya dengan daya beli pinjaman luar negeri bersih yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada periode yang sama seperti yang ditunjukkan dalam Tabel IV - 15.

4.4. Produk Domestik Bruto, Investasi dan Tabungan Domestik

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa berbagai upaya dan kebijaksanaan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia sehingga kegiatan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel IV - 16.

Peranan investasi domestik terhadap pembentukan PDB, di mana peranannya hanya merupakan setengah dari peranan investasi terhadap PDB. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV - 17. Pada tahun 1969, peranan tabungan domestik terhadap PDB hanya 0,8 persen, kemudian meningkat terus hingga mencapai 12,3 persen pada tahun 1976. Peranan tabungan ini jika dibandingkan dengan peranan investasi pada tahun yang sama (1976) maka peranan terhadap PDB mencapai 20,7 persen. Ini berarti bahwa hampir 21 persen dari PDB diperoleh dari

TABEL IV - 14
 KAPASITAS IMPOR PERSEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN
 HASIL TRANSAKSI LUAR NEGERI
 (Miliar Rp)

Tahun	Persediaan Sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negeri	Indeks [§] Impor	Kapasitas Impor Persediaan sumber Pembiayaan Hasil Transaksi Luar Negri
1969	156,9	67	253,6
1970	176,1	69	284,2
1971	220,5	74	297,9
1972	497,3	88	565,1
1973	635,8	100	635,8
1974	1.214,6	132	920,2
1975	851,7	143	595,6
1976	1.593,5	154	1.034,7
1977	1.904,2	161	1.182,7
1978	2.831,5	176	1.608,8
1979	4.333,8	229	1.892,5
1980	5.888,3	265	2.222,0
1981	5.663,9	286	1.980,4
1982	4.868,5	300	1.622,8
1983	8.788,0	100	8.788,0
1984	10.814,6	85	12.723,1
1985	10.965,9	63	17.406,2
1986	8.637,9	66	13.087,7
1987	12.608,3	75	16.811,1
1988	13.621,9	81	16.817,2

Catatan : [§]Tahun 1969-1982 berdasarkan harga konstan 1973
 dan tahun 1980-1988 berdasarkan harga konstan
 1983.

Sumber : Tabel IV - 12 dan Biro Pusat Statistik.

TABEL IV - 15

KAPASITAS IMPOR PINJAMAN BERSIH YANG DAPAT
DIMANFAATKAN DALAM SEKTOR RESMI PEMERINTAH
(Miliar Rp)

Tahun	Pinjaman Bersih yang dapat dimanfaatkan	Indeks Impor	Kapasitas Impor Pinjaman Bersih yang dapat dimanfaatkan
1969	145,3	67	216,9
1970	265,7	69	385,1
1971	314,5	74	425,0
1972	385,4	88	437,9
1973	293,5	100	293,5
1974	350,4	132	265,5
1975	675,1	143	472,1
1976	659,1	154	428,0
1977	293,4	161	182,2
1978	96,9	176	55,1
1979	- 134,0	229	- 58,5
1980	502,5	265	189,6
1981	402,6	286	140,8
1982	1.345,1	300	448,4
1983	2.367,0	100	2.367,0
1984	597,1	85	702,5
1985	- 503,2	63	- 798,7
1986	319,5	66	484,1
1987	402,2	75	536,3
1988	509,8	81	629,4

Catatan : Indeks Impor sama dengan Tabel IV - 14.

Sumber : Biro Pusat Statistik.

TABEL IV - 16
 PERKEMBANGAN INVESTASI DOMESTIK
 1969 - 1988
 (Miliar Rp)

Tahun	Produk Domestik Bruto (harga berlaku) (A)	Investasi Domestik (B)	B
			A (dalam %)
1969	2.718,0	315,0	11,6
1970	3.238,0	455,0	10,1
1971	3.672,0	580,0	15,8
1972	4.564,0	857,0	18,8
1973	6.753,0	1.208,0	17,9
1974	10.708,0	1.797,0	16,8
1975	12.642,0	2.571,7	20,3
1976	15.467,0	3.204,9	20,7
1977	19.033,0	3.826,4	20,1
1978	23.814,0	4.670,7	19,6
1979	34.052,0	6.704,3	19,7
1980	48.914,0	9.485,2	19,4
1981	58.240,0	11.553,4	19,8
1982	62.737,0	17.406,6	27,7
1983	73.737,0	21.669,0	29,4
1984	85.914,0	20.136,1	23,4
1985	90.595,0	22.366,9	24,7
1986	137.925,0	24.781,9	18,0
1987	142.553,0	30.980,2	21,7
1988	156.870,0	33.907,0	21,6

Sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 1989/1990; Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, berbagai tahun.

TABEL IV - 17
 PERKEMBANGAN TABUNGAN DOMESTIK
 1969 - 1988
 (Miliar Rp.)

Tahun	P D B Harga berlaku	Tabungan Pemerintah	Tabungan Masyarakat	Tabungan Domestik	Rasio Tabungan Domestik terhadap PDB (%)
1969	2.718,0	20,400	0	20,400	0,8
1970	3.233,0	49,100	50,429	99,529	3,1
1971	3.672,0	73,275	109,655	182,930	5,0
1972	4.564,0	134,100	171,604	305,704	6,7
1973	6.753,0	228,925	181,464	410,389	6,1
1974	10.703,0	616,800	282,699	899,499	8,4
1975	12.642,0	866,375	456,557	1.322,932	10,5
1976	15.467,0	1.184,475	721,017	1.905,492	12,3
1977	19.033,0	1.358,925	845,576	2.204,501	11,6
1978	23.814,0	1.483,425	878,194	2.361,619	10,0
1979	34.052,0	2.356,850	928,100	3.284,950	9,6
1980	48.914,0	3.979,000	1.026,700	5.005,700	10,2
1981	58.240,0	5.033,000	1.213,600	6.246,600	10,7
1982	62.737,0	5.375,250	1.677,000	7.052,250	11,2
1983	73.737,0	5.871,175	3.371,900	9.243,075	12,5
1984	85.914,0	6.362,600	3.167,000	9.529,600	10,1
1985	90.595,0	7.095,500	17.147,000	24.242,500	26,8
1986	137.925,0	3.762,000	15.354,000	19.116,000	13,9
1987	142.553,0	3.136,000	19.534,000	22.670,000	15,9
1988	156.870,0	2.529,000	27.852,000	30.381,000	19,4

Sumber : Nota Keuangan, RAPBN 1989/1990.

TABEL IV - 18
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA INDONESIA
1969 - 1988

Tahun	Angkatan Kerja (juta orang)	Pertumbuhan (%)
1969	40.697.151	
1970	40998.763	1,4
1971 1)	41.261.216	0,7
1972	41.825.295	1,4
1973	43.675.646	4,4
1974	45.526.000	4,2
1975	47.376.354	4,2
1976 2)	48.409.795	2,1
1977 3)	49.443.236	2,1
1978 4)	51.958.298	5,1
1979	54.475.000	4,8
1980 5)	60.637.644	11,3
1981	62.375.040	3,5
1982	64.976.534	3,6
1983	67.266.787	3,5
1984	69.030.000	2,6
1985	70.824.780	2,6
1986	72.807.874	2,8
1987	74.846.494	2,8
1988	76.942.195	2,8

Catatan : 1) Sensus Penduduk Tahun 1971 Seri D.
2) Sakernas 1976, September - Desember.
3) Sakernas 1977 rata-rata.
4) Sakernas 1988 Triwulan IV.
5) Sensus Penduduk Oktober 1980, BPS.

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, berbagai terbitan.

investasi domestik, sedangkan 12,3 persen diperoleh dari tabungan domestik. Selama periode tahun 1969 - 1988, peranan tabungan domestik terhadap PDB mencapai puncaknya pada tahun 1985, yaitu sebesar 26,8 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tabungan masyarakat lebih dari 400 persen dari tahun 1984. Peningkatan tabungan ini sehubungan dengan tingkat bunga riil pada saat itu disamping kesadaran masyarakat sendiri untuk menyimpan uangnya di bank. Tingkat bunga riil pada tahun 1985 cukup tinggi sehingga menarik minat masyarakat untuk menabung.

4.5 Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ICOR Indonesia

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya angkatan kerja. Pertambahan angkatan kerja di Indonesia dapat dilihat pada Tabel IV - 18. Tabel ini menunjukkan bahwa dalam periode 1969 - 1988, tambahan angkatan kerja mencapai sekitar 16 juta orang. Jika dikaitkan investasi dengan ICOR maupun dari segi elastisitas kesempatan kerja, maka tambahan angkatan kerja tersebut sulit ditampung seluruhnya dalam Repelita IV.

Di Indonesia ICOR selama Repelita III menunjukkan angka 4,24. Jika ICOR itu berlanjut pada Repelita IV, maka berarti diperlukan investasi sekitar 36,2 persen dari PDB. Pada tahun 1988 PDB Indonesia mencapai Rp 156.870 milyar sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai Rp 142.553 milyar. Dengan demikian mengalami kenaikan 9,1 persen berdasarkan harga berlaku, sedangkan dalam harga konstan 1983 hanya 5,1

persen.

Dalam analisa investasi ditekankan pada harga berlaku, agar dapat dikaitkan dengan anggaran pembangunan pemerintah dan upaya pemerintah memberikan peluang partisipasi kepada swasta sekitar 50 persen dari total investasi yang diperlukan. Jika dilihat dari dari asumsi investasi yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan ICOR Pelita III, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp 60.552 milyar guna mewujudkan "full employment" pada tahun 1988. Keadaan ini nampaknya tidak bisa terwujud, sekalipun investasi yang dianggarkan pemerintah dalam APBN tahun 1988/1989 lebih kurang Rp 33 milyar dan dari pihak swasta juga diharapkan sebanyak itu. Kenyataan menunjukkan bahwa masih saja terdapat pengangguran.

Dengan demikian jumlah investasi yang didasarkan pada model Domar dan Rostow belumlah dapat menjamin terwujudnya full employment. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan daya serap tenaga kerja pada bidang-bidang investasi tertentu dalam unit-unit ekonomi.
2. Adanya perbedaan tingkat PDB per kapita dan tambahan angkatan kerja di berbagai negara.
3. Tingkat kemajuan prasarana dan sarana juga banyak menentukan besarnya investasi per tenaga kerja di suatu negara.
4. Daya serap investasi terhadap tenaga kerja sangat ditentukan oleh keadaan pasar. Keadaan pasar yang lesu akan menyebabkan terjadinya kapasitas menganggur bagi indus-

tri tertentu, sehingga tenaga kerja yang digunakan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Di Indonesia, sekalipun investasi dilihat dari segi harga berlaku maupun dari segi harga konstan sudah melampaui ketentuan yang dikemukakan oleh Domar dan Rostow, juga masih tetap terdapat pengangguran. Namun demikian, pengangguran terbuka masih relatif kecil sampai dengan tahun 1980, karena di Indonesia kesempatan kerja masih bisa diusahakan melalui keluarga, sekalipun hal itu bisa dalam bentuk pengangguran tak kentara (lihat Tabel IV - 19 a dan IV - 19 b).

Data pada Tabel IV - 20 menunjukkan bahwa sejak Pelita II semestinya tidak terdapat lagi pengangguran di Indonesia jika model Domar dan Rostow berlaku. Rostow menyatakan dasar utama untuk "take off" dalam keadaan full employment diperlukan investasi sebesar 10 persen dari PDB suatu negara.

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa sekalipun telah dipenuhi ketentuan yang dikemukakan Domar dan Rostow, tetapi pengangguran tetap ada. Pada tahun 1980 misalnya, tingkat pengangguran mencapai 1,66 persen dari angkatan kerja. Padahal tahun 1980 merupakan tahun kedua Pelita III, di mana tingkat pertumbuhan rata-rata dalam periode itu mencapai 6,1 persen, sedangkan ICDR 4,24. Dengan demikian, maka dalam periode itu hanya dibutuhkan investasi sebesar 25,86 persen dari PDB. Sedangkan tingkat investasi setiap tahun pada Pelita III hanya mencapai rata-rata 23,2 persen dari PDB. Oleh karena kebutuhan investasi lebih besar dari pada

yang dapat diakumulasikan di dalam negeri, maka dibutuhkan tambahan dana dari sumber luar negeri sebesar 2,6 persen.

Dalam periode 1980-1983, terdapat indikasi bahwa pengangguran dan pengangguran tak kentara meningkat. Salah satu indikasi ini adalah terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1981 menjadi 7,9 persen, dibanding tahun sebelumnya mencapai 9,9 persen. Bahkan tahun 1982 tingkat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,2 persen atas dasar harga konstan 1973. Sekalipun terjadi kenaikan tingkat pertumbuhan pada tahun 1983 dan 1984, yaitu masing-masing 4,2 persen dan 6,0 persen, tetapi tingkat pertumbuhan terakhir ini sedikit lebih setengah tingkat pertumbuhan tahun 1980. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pun pada tahun 1980, ternyata masih terdapat pengangguran sebesar 1,6 persen dari angkatan kerja atau 36,52 persen dari penduduk yang bekerja.

Masalah yang timbul dimasa mendatang adalah terdapatnya peningkatan angkatan kerja diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan periode 1969-1981. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan terbatasnya sumber dana yang bisa diharapkan menunjang pembangunan. Di samping itu, keadaan ekonomi luar negeri dan dalam negeri yang terasa sekali kelesuannya di Indonesia sejak tahun 1982. Dengan demikian peningkatan angkatan kerja yang cukup besar kurang dapat diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV - 21.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat elastisitas kesempatan kerja menurun selama Repelita IV dibandingkan dengan periode 1971 - 1980. Dalam Repelita IV tingkat elastisitas itu hanya mencapai angka 0,36, sedangkan periode 1971 - 1980 mencapai 0,37. Dalam periode 1971-1980 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 8,07 persen, sehingga angkatan kerja yang meningkat secara tajam diiringi dengan peluang kesempatan kerja yang semakin menyempit, sehingga menyebabkan tidak semua angkatan kerja dapat ditampung pada Pelita IV. Peluang kesempatan kerja dalam Repelita IV kelihatan juga agak sulit dicapai sebab tingkat pertumbuhan pada tahun pertama Repelita IV hanya 4,2 persen. Jadi berarti tingkat pertumbuhan kesempatan kerja pada tahun itu paling tinggi 1,5 persen saja. Rendahnya tingkat pertumbuhan sektor industri, yaitu sekitar 4 persen, berdasarkan harga konstan 1973. Jika orientasi investasi lebih padat modal, maka pengangguran akan meningkat. Akan tetapi bila orientasinya padat karya, maka pengangguran rendah.

TABEL IV - 19 a
PEMBANGUNAN DAN ANGKATAN KERJA

Bulan dan Tahun	Pengangguran				Angkatan Kerja (orang)	% Pengang- guran	
	Pereapuan (orang)	%	Laki-laki (orang)	%			
Sensus Penduduk, Oktober 1961	666.990	6,9	120.292	4,8	1.869.913	34.578.240	5,4
Susenas, Nopember 1964, Februari 1965	483.826	3,3	441.843	1,8	844.869	36.543.800	2,3
Sensus Penduduk Oktober 1971	2.065.375	11,5	1.575.273	7,5	3.640.648	41.261.216	8,8
Supas, Maret 1976	408.160	1,9	635.155	1,9	1.835.515	54.498.283	1,9
Sakernas, September - Desember 1976	263.335	1,6	860.464	2,7	1.123.799	48.438.954	2,3
Sakernas 1977 (rata-rata)	278.526	1,6	857.295	2,6	1.427.821	49.488.488	2,9
Sakernas 1978 (rata-rata)	332.285	1,8	958.956	2,9	1.283.161	53.897.895	2,4
Sensus Penduduk 1980	388.822	2,2	488.854	1,4	868.876	52.421.345	1,7

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1961-1980,
Maret 1983, hal. 9 - 32.

TABEL IV - 19 b
PENGANGGURAN TAK KENTARA

Bulan dan Tahun	Pengangguran			Angkatan Kerja (orang)	% dari Angkatan Kerja	Tenaga Kerja (orang)	% dari Tenaga Kerja
	Perempuan (orang)	Laki-laki (orang)	Jumlah (orang)				
Sensus Penduduk, Oktober 1961	---	---	---	34.578.240	-	32.700.614	-
Susenas, Nopember 1964, Februari 1965	4.945.000	5.871.000	10.816.000	35.543.000	29,60	35.698.000	30,30
Sensus Penduduk Oktober 1971	---	---	---	41.261.216	-	37.627.656	-
Supas, Maret 1976	10.384.570	9.298.349	19.674.919	54.490.283	36,11	53.443.668	36,01
Sakernas, September Desember 1976	8.619.642	10.101.100	18.720.750	48.430.954	38,65	47.306.237	39,57
Sakernas 1977 (rata-rata)	7.996.847	9.637.836	17.633.083	49.400.480	35,69	48.314.644	36,50
Sakernas 1978 (rata-rata)	10.171.746	11.918.958	22.090.704	53.097.095	41,60	51.780.359	42,66
Sensus Penduduk 1980	8.554.040	10.273.334	18.827.374	52.421.345	35,92	51.553.122	36,52

Catatan: Tidak termasuk mereka yang sementara tidak bekerja.

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1961-1980, Maret 1983, hal. 9 - 32.

TABEL IV - 20
 PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN ICOR INDONESIA

Repelita	Pertumbuhan Ekonomi rata-rata per tahun (%)	I/PDB rata-rata per tahun (%)	Incremental Capital Output Ratio
I	8,79	15,37	2,26
II	7,11	23,25	3,27
III	6,10	25,86	4,24
IV	4,24	26,70	6,30

Sumber: BPS, Repelita IV.

TABEL IV - 21
ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA, DISTRIBUSI DAN
PERTUMBUHAN PDB DAN KESEMPATAN KERJA

Kelompok	Elastisitas Kesempatan kerja		Laju Pertumbuhan 1983-1988 (%)		Distribusi PDB (%)		Distribusi N (%)	
	1971-1980	1983-1988	PDB	N	1983	1988	1983	1988
Pertanian	0,2632	0,2667	3,0	0,0	29,3	26,5	54,0	52,2
Pertambangan	2,5205	2,5200	2,5	6,3	7,0	6,1	0,4	0,5
Industri	0,4161	0,4210	9,5	4,0	15,0	19,0	9,3	10,3
Bangunan	0,1582	0,1600	5,0	0,0	6,7	6,7	3,2	3,0
Pengangkutan dan Komunikasi	0,9286	0,9231	5,2	4,0	6,0	6,1	3,4	3,9
Lain-lain	0,5699	0,5600	5,0	2,0	35,2	28,0	20,0	30,1
Semua Sektor	0,3704	0,3600	5,0	3,3	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: PDB = Produk Domestik Bruto
N = Kesempatan Kerja

Sumber: Buku Repelita IV dan Hendra Esmara,
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Repelita IV:
Perencanaan Kesempatan Kerja, Unand, Padang,
25 Agustus 1983.

BAB V

PERANAN MODAL ASING DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

5.1. Peranan Modal Asing Dalam Anggaran Belanja Negara

Sejak Pemerintah Ordo Baru, defisit anggaran belanja negara secara terus menerus telah ditutupi dengan pembiayaan dari luar negeri. Selisih diantara jumlah pengeluaran pemerintah dengan jumlah pemasukan dari dalam negeri menunjukkan posisi negatif terus menerus. Dalam hal ini kita artikan sebagai defisit dalam anggaran belanja negara. Tabel V - 1 menunjukkan situasi ini. Dengan adanya pembiayaan dari luar negeri maka saldo keuangan negara dalam periode 1967/1970 - 1988/1989 menunjukkan posisi yang positif kecuali pada tahun fiskal 1979/1980, 1986/1987, 1987/1988 dan 1988/1989. Dari angka-angka pada Tabel V - 1 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang negatif di antara modal luar negeri yang masuk untuk pembiayaan anggaran belanja negara dengan surplus anggaran belanja (surplus dalam hal ini menunjukkan angka-angka negatif). Dalam konteks ini kita dapat mengemukakan proposisi bahwa modal luar negeri lebih berfungsi sebagai penyedia sumber-sumber pembiayaan daripada berfungsi sebagai penambah sumber-sumber yang dapat diinvestasikan (investible resources). Ditambah dengan fungsinya sebagai sumber pembiayaan surplus impor seperti yang telah dikemukakan di muka, maka modal luar negeri yang masuk ke Indonesia, khususnya pinjaman luar negeri yang di terima secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, dapat dikatakan

lebih banyak berfungsi sebagai penyedia sumber-sumber pembiayaan anggaran belanja negara dan surplus impor daripada berfungsi sebagai penambah sumber-sumber yang dapat diinvestasikan. Oleh karena pos-pos dalam anggaran belanja negara yang dibiayai oleh modal luar negeri adalah pos-pos yang menghendaki impor, maka dapat dikatakan juga bahwa pinjaman luar negeri yang masuk ke Indonesia lebih banyak berfungsi untuk membiayai kesenjangan devisa (foreign exchange gap) daripada membiayai kesenjangan tabungan (saving gap).

Tabel V - 2 menunjukkan perkembangan peranan modal luar negeri dalam membiayai pengeluaran pembangunan dan keseluruhan pengeluaran dalam anggaran belanja negara selama periode 1969/1970 - 1988/1989. Kita lihat bahwa kecenderungan menurunnya peranan relatif modal asing dalam membiayai pengeluaran pembangunan dilihat dari persentasenya mengarah ke tingkat dibawah 30 persen pada tahun 1982/1983, kemudian meningkat kembali di atas 30 persen dan bahkan 40 persen sesudah tahun 1982/1983. Pada saat yang bersamaan posisi relatif modal asing dalam pembiayaan keseluruhan pengeluaran dalam anggaran belanja negara yang telah berhasil menurun ke tingkat di bawah 15 persen pada tahun 1982/1983, tetapi meningkat kembali di atas 15 persen bahkan di atas 20 persen sesudah tahun fiskal 1982/1983. Cukup besarnya peranan modal asing dalam pembiayaan pengeluaran pembangunan dan keseluruhan pengeluaran dalam anggaran belanja negara di Indonesia ini berbeda jauh dari negara-negara berkembang seperti

TABEL V - 1
 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
 1969/1970 - 1988/1989
 (miliar Rp.)

Tahun Fiskal	Penerimaan Dalam Negeri	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pebanjungan	Pengeluaran Pemerintah	Defisit	Pebiayaan Pihak Luar Negeri	Saldo Keuangan Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8
1969/70	244	216,5	118,2	334,7	- 90,7	182,7	12,8
1970/71	345	288,2	169,8	458,8	- 113,8	128,4	7,4
1971/72	428	349,1	195,9	545,8	- 117,8	135,5	18,5
1972/73	591	438,1	298,2	736,3	- 145,3	149,5	4,2
1973/74	968	713,3	451,8	1.164,3	- 196,3	283,9	7,6
1974/75	1.754	1.816,1	969,6	1.985,7	- 231,7	232,8	8,3
1975/76	2.242	1.332,6	1.397,7	2.738,3	- 488,3	491,6	3,3
1976/77	2.986	1.624,8	2.854,5	3.684,3	- 778,3	783,8	5,5
1977/78	3.535	2.148,9	2.156,8	4.385,7	- 778,7	773,4	2,7
1978/79	4.266	2.743,7	2.555,6	5.299,3	- 1.833,3	1.835,5	2,2
1979/80	6.698	4.861,8	4.816,1	8.877,9	- 1.387,9	1.381,1	- 6,8
1980/81	10.227	5.888,8	5.916,1	11.716,1	- 1.489,1	1.493,8	4,7
1981/82	12.213	6.977,6	6.948,1	13.917,7	- 1.704,7	1.709,8	4,3
1982/83	12.427	6.995,3	7.359,6	14.355,9	- 1.938,9	1.948,8	11,1
1983/84	14.443	8.411,8	9.899,1	18.311,8	- 3.878,8	3.882,4	4,4
1984/85	15.986	9.428,9	9.951,9	19.388,8	- 3.474,8	3.478,8	3,2
1985/86	19.253	11.951,5	10.873,1	22.824,6	- 3.571,6	3.572,6	1,8
1986/87	16.141	13.559,3	8.332,8	21.891,3	- 5.750,3	4.368,1	- 1.382,2
1987/88	17.236	17.481,5	9.479,8	26.961,3	- 9.725,3	5.547,8	- 4.178,3
1988/89	25.250	28.739,8	12.251,8	32.998,8	- 7.748,8	6.151,4	- 1.588,6

Catatan : $6 = 2 - (3 + 4)$; $8 = 6 + 7$

Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

TABEL V - 2
 PENGELUARAN PEMERINTAH YANG DIBIYAI
 PIHAK LUAR NEGERI
 (miliar Rp.)

Tahun Fiskal	Pembiayaan Pihak Luar Negeri (A)	Pengeluaran Pembangunan (B)	Jumlah Pengeluaran Pemerintah (C)	A	A
				B	C
				(%)	(%)
1969/70	102,7	118,2	334,7	86,9	30,9
1970/71	120,4	169,8	458,0	70,9	26,3
1971/72	135,5	195,9	545,0	69,2	24,9
1972/73	149,5	298,2	736,3	50,1	20,3
1973/74	203,9	451,0	1.164,3	45,2	17,5
1974/75	232,0	969,6	1.985,7	23,9	11,7
1975/76	491,6	1.397,7	2.730,3	35,2	18,0
1976/77	783,8	2.054,5	3.684,3	39,2	21,3
1977/78	773,4	2.156,8	4.305,7	35,9	18,0
1978/79	1.035,5	2.555,6	5.299,3	40,5	19,5
1979/80	1.381,1	4.016,1	8.077,9	34,4	17,1
1980/81	1.493,8	5.916,1	11.716,1	25,2	12,7
1981/82	1.709,0	6.940,1	13.917,7	24,6	12,3
1982/83	1.940,0	7.359,6	14.385,9	26,4	13,5
1983/84	3.882,2	9.899,1	18.311,0	39,2	21,2
1984/85	3.478,0	9.951,9	19.380,8	34,9	17,9
1985/86	3.572,6	10.873,1	22.824,6	32,9	15,7
1986/87	4.368,1	8.332,0	21.891,3	54,4	19,9
1987/88	5.547,0	9.479,8	26.961,3	58,5	20,8
1988/89	6.151,4	12.251,0	32.990,0	50,2	18,6

Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

India, dimana pembiayaan pembangunan dilakukan dengan kombinasi dari tiga cara pembiayaan, yaitu pinjaman dari dalam negeri, defisit financing dan pinjaman dari luar negeri. Dengan cara ini porsi modal asing dalam pembiayaan anggaran belanja negara di India hanya empat sampai enam persen saja. Dengan cara ini ketergantungan India terhadap luar negeri dalam anggaran belanjanya relatif kecil.

5.2. Peranan Modal Asing dalam Pemupukan Investasi Domestik

Hasil empiris penerapan regresi linier fungsi investasi domestik dapat dikemukakan sebagai berikut :

$$I = 0,4576 + 0,1776 Y + 0,8722 F$$

$$(0,0192) \quad (0,3762)$$

$$t = \quad (9,261) \quad (2,318)$$

$$R = 0,9687$$

$$df = 17$$

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa baik PDB maupun arus masuk modal asing secara bersama-sama memberikan sumbangan yang berarti sebesar 96,87 persen terhadap variasi naik turunnya investasi domestik. Hal ini dapat pula dibuktikan bahwa secara simultan mempunyai pengaruh signifikan jika kita uji dengan uji F melalui analisa varian seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran I. Berdasarkan hitungan komputer, nilai F diperoleh 294,9, berarti jauh lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat signifikan 5 persen maupun 1 persen.

Demikian pula jika ditinjau secara individu, sumbangan PDB dalam pemupukan investasi domestik sangat besar. Hal ini

ditunjukkan oleh koefisien determinasi parsialnya sebesar 83,46 persen. Sedangkan peranan arus masuk modal asing dalam pemupukan investasi domestik sangat kecil, yaitu hanya 24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa arus masuk modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan efek yang besar terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peranan positifnya yang kecil ini semata-mata disebabkan adanya penggunaan modal asing untuk membiayai impor content dari investasi yang dilaksanakan, terutama di sektor negara dan sektor modern yang sangat tergantung kepada impor.

5.3. Peranan Modal Asing dalam Pemupukan Tabungan Domestik

Berdasarkan hasil perhitungan komputer, maka persamaan garis regresi linier dari tabungan domestik adalah sebagai berikut :

$$S = -1,3369 + 0,1725 Y + 0,0445 F$$

$$(0,0313) \quad (0,6138)$$

$$t = \quad (5,512) \quad (0,072)$$

$$R = 0,8805$$

$$df = 17$$

Regresi di atas menunjukkan bahwa baik PDB maupun arus masuk modal asing ke Indonesia secara bersama-sama memberikan sumbangan yang berarti sebesar 88,05 persen terhadap variasi naik turunnya tabungan domestik. Sekalipun salah satu variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, namun secara bersama, simultan mempunyai pengaruh signifikan jika kita uji dengan uji F seperti yang

diperlihatkan dalam analisa varian dalam Lampiran II. Berdasarkan hasil perhitungan komputer, nilai F observasi diperoleh sebesar 71,024 persen. Baik untuk tingkat signifikan lima persen maupun untuk satu persen nilai F observasi lebih besar besar dibandingkan nilai F tabel.

Dalam persamaan tabungan ini, ada dua hal pokok yang sering dikemukakan mengenai sumbangan negatif modal asing dalam pemupukan tabungan domestik di negara-negara berkembang.

Pertama, penjelasan yang dikaitkan dengan pandangan Institutional-structuralist.¹ Menurut pandangan ini masuknya modal asing telah banyak mengambil alih kegiatan-kegiatan yang paling menguntungkan dalam perekonomian sehingga menjadi relatif langka. Terjadilah yang disebut pengaruh pendesakan (crowding out effect) sehingga tidak menggalakkan timbulnya potensi tabungan domestik untuk tujuan investasi. Masuknya modal asing, menurut pandangan ini, juga telah mendorong konsumsi barang-barang mewah, karena investasi asing banyak digunakan untuk memproduksi barang-barang mewah untuk konsumsi golongan berpenghasilan tinggi. Terjadilah apa yang disebut demonstration effect dalam artian negatif. *Kedua* adalah kurangnya upaya pemerintah dalam memobilisasi pembiayaan dari dalam negeri oleh karena modal asing terus dapat diusahakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

¹D.E. Hooman, "The External Debt Contribution to Output Employment, Productivity An Consumption: A Model and Application to Chile", *Economic Modelling*, Januari 1986, hal. 53-71.

Dalam hal ini sebetulnya bukan modal asing yang perlu dipersoalkan tetapi Pemerintah Nasional negara-negara berkembang itu sendiri. Kedua penjelasan pokok ini, menurut pendapat penulis, kemungkinan bisa dapat digunakan untuk menerangkan mengapa modal asing kurang peranannya dalam pemupukan tabungan domestik di Indonesia. Tergesernya banyak perusahaan-perusahaan domestik merajarelaya konsumsi tinggi dan lemahnya mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri telah terjadi di Indonesia selama periode yang diamati.

5.4. Peranan Modal Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi

Oleh karena peranan modal asing yang masuk ke Indonesia dalam periode 1969 - 1988 terhadap investasi domestik begitu kecil, maka tentulah dapat diperkirakan bahwa peranan modal asing yang masuk ke Indonesia ini terhadap pertumbuhan ekonomi akan kecil juga.

Hasil-hasil regresi model persamaan pertumbuhan ini untuk periode 1969 - 1988 adalah sebagai berikut :

$$RY = 5,3205 - 0,0567 \frac{F}{Y} + 0,3941 CLF$$

	(0,2643)	(0,2798)
	(-0,215)	(1,409)

t =
R = 0,0266
df = 17



Kita peroleh bahwa koefisien regresi untuk arus masuk modal asing bernilai negatif walaupun secara statistik tidak signifikan. Namun demikian penemuan ini dengan jelas menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampaknya sejalan dengan pendapat Dowling dan Hiemenz yang mengungkapkan sebab-sebab ketidak-

efektifan penggunaan bantuan luar negeri dan modal asing lainnya di negara-negara Asia yang berpendapatan rendah.² Sebab-sebabnya antara lain :

1. Bantuan luar negeri atau modal asing yang mulanya diperuntukan bagi pembangunan sosial overhead capital ternyata dialokasikan untuk memperbesar konsumsi pemerintah dalam bentuk kenaikan gaji pegawai negeri, memperbesar angkatan bersenjata dan sebagainya atau diinvestasikan dalam bentuk proyek-proyek padat modal seperti industri berat, pesawat terbang, peralatan modern dan sebagainya.

Dalam bentuk yang pertama, tabungan domestik (dan investasi domestik) mungkin menurun akibat masuknya modal asing.

Pada kasus kedua, produktivitas modal dari proyek-proyek tersebut mungkin sangat rendah karena gestation and pay off period yang panjang, sehingga rata-rata Capital Output Ratio (COR) dari total investasi meningkat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi mungkin menurun sekalipun total investasi meningkat.

2. Kebijakan yang menitik beratkan strategi industrialisasi substitusi impor di sektor pertanian dan industri yang dibarengi kontrol pemerintah yang ketat terhadap aktivitas ekonomi, akan meningkatkan COR dan berarti menukarkan produk marginal dari bantuan luar negeri.

²J. Malcolm Dowling Jr. and V. Hiemenz, "Aid, Saving and Growth in the Asian Region", *Developing Economics*, Vol. 21, No. 1, Maret 1983.

Indonesia agaknya juga mengalami kecenderungan semacam ini. Mubyarto yang mengutip hasil penelitian Sundrum (1986), mengatakan :

"Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah berupa proteksi terhadap industri manufaktur maupun penyediaan anggaran yang besar untuk industri manufaktur dan bangunan hampir 67 persen dari seluruh investasi dimanfaatkan kedua sektor ini, khususnya sektor bangunan yang pada tahun 1980 menyerap 58 persen dari seluruh pengeluaran investasi. Dalam pada itu pengeluaran pemerintah yang meningkat pesat (10 persen pada tahun 1967 menjadi 26 persen pada tahun 1980), telah dimanfaatkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan jasa-jasa lain yang keduanya menyerap 74 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini selama 14 tahun naik rata-rata 16,3 persen per tahun jauh melebihi kenaikan PDB yang hanya 7,5 persen per tahun".³

Selain ketidakefektifan pemanfaatan bantuan luar negeri, dampak negatif modal asing juga disebabkan karena meningkatnya sumber hutang yang berasal dari kreditor swasta, yang sebagian merupakan kredit ekspor dan sisanya merupakan pinjaman komersial. Dengan demikian, mengakibatkan meningkatnya kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang yang semakin berat dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi.

³Mubyarto, "Pengkajian Ulang Strategi Pembangunan Nasional", *Prisma*, No. 1, Januari 1983, hal. 3 - 12.

Selanjutnya, laju pertumbuhan angkatan kerja ternyata mempunyai hubungan positif dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja dan produktivitas kerja. Akan tetapi, kemampuan variabel pertumbuhan angkatan kerja untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi itu masih sangat kecil dalam periode yang diteliti. Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi parsialnya hanya sepuluh persen. Jika dilakukan uji t , juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan angkatan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai dengan nilai t hitung (1,409) yang lebih besar daripada nilai t tabel (1,333) pada tingkat signifikan sepuluh persen.

Kecilnya pengaruh perkembangan angkatan kerja ini terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta kebanyakan berorientasi padat modal, sehingga menimbulkan pengangguran.
2. Tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan dengan pertumbuhan produktivitas kerja sehingga kurang mampu menyerap pengangguran yang ada.
3. Kurangnya modal yang tersedia di dalam negeri untuk pembangunan sehingga fungsi laju pertumbuhan angkatan kerja dan produktivitas kerja sangat kecil peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Modal asing yang masuk ke Indonesia sebagian digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja negara dan sebagian lagi untuk membayar bunga dan cicilan hutang, sehingga peranannya terhadap investasi sangat kecil pula. Sebagai akibatnya, tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia.

BAB VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 6.1.1. Selama periode 1969 -1988, arus masuk modal asing ke Indonesia yang terdiri dari investasi modal asing dan hutang luar negeri, setelah memperhitungkan cicilan hutang dan bunga hutang luar negeri telah menunjukkan nilai kumulatif yang positif. Dalam konteks ini, Indonesia telah menjadi importir modal.
- 6.1.2. Arus masuk modal asing dalam periode 1969-1988 tidak menimbulkan dampak positif terhadap tabungan domestik. Malah dampak itu bersifat negatif yang menunjukkan bahwa arus masuk modal asing telah mensubstitusikan tabungan domestik, bukan menambahnya. Berhubung impor content yang tinggi, menunjukkan bahwa arus masuk modal asing telah menimbulkan dampak positif terhadap investasi domestik, sekalipun itu hanya kecil.
- 6.1.3. Dampak positif modal asing terhadap investasi domestik yang ternyata kecil itu, memberi petunjuk bahwa dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi juga kecil. Penemuan menunjukkan bahwa dampak ini memang ternyata kecil dan bahkan negatif. Dampak positif yang kecil ini tidak dapat ditimbulkan oleh sumber-

sumber ekonomi yang dimobilisir di dalam negeri sehingga kita tidak perlu membayar harga pembangunan yang begitu mahal terhadap pihak luar negeri.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut di atas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- 6.2.1. Kita mengajak pemerintah untuk merenungkan masalah modal asing ini dengan secermat-cermatnya dan tampil dengan suatu keputusan politik yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari belenggu pihak asing yang sebenarnya telah dan akan memiskinkan kita.
- 6.2.2. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk berusaha memperoleh suatu moratorium atau tidak membayar cicilan hutang luar negeri dan bunga hutang luar negeri selama suatu periode tertentu, misalnya selama 7-10 tahun tanpa tambahan biaya apa pun. Perlu diusahakan agar selama periode moratorium ini bunga tidak dikenakan. Juga diusahakan agar seluruh penyesuaian kurs dan penyesuaian-penyesuaian lainnya yang memperbesar beban hutang luar negeri dihapuskan.
- 6.2.3. Pemerintah perlu mengkaji ulang secara sungguh-sungguh, apa manfaat modal asing dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan oleh modal asing ini terhadap ekonomi Indonesia bersifat positif atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Arsjad, Swasono dan Iwan J.A., Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990, UI-Press, Jakarta, 1989
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, UI, Jakarta, 1987
- Carlin, Alan, "Projects versus Programme Aid from the Donor's Viewpoint", Economic Journal, Maret 1967.
- Chenery, H and Stent. A., Foreign Assistent and Economic Development, AER, 1956.
- Djamin, Zulkarnaen, Pembangunan Ekonomi Indonesia sejak Repelita I, FE-UI, Jakarta, 1984.
- Djojohadikusumo, Sumitro, Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Dornbusch, F., Fisher, S., Macroeconomics, Edisi ketiga, Terj. oleh R. Sitompul, Erlangga, Jakarta, 1986
- Esmara, Hendra, Memelihara Momentum Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.
- Gupta, K., Islam, M. Arisal, Foreign Capital, Saving and Growth: An International Cross-Section Study, Holland, 1983.
- Hasanuddin, Basri, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi, Lepas, Ujung Pandang, 1986.

- Jhingan, M.L., The Economics of Development and Planning,
Terj. oleh D. Guritno, CV. Rajawali, Jakarta, 1988
- Kamaluddin, Rustian, Bantuan Luar Negeri dan Beban Hutang
yang Semakin Berat, Jakarta, 1986.
- _____, Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pempa-
nunan Daerah, FE-UI, Jakarta, 1987
- Kinleberger, C.P., Linder, P.H., International Economics,
Edisi ketujuh, Terj. oleh R. Sitompul, Erlangga,
Jakarta, 1986.
- Kuncoro, Mudrajad, "Dampak Arus Masuk Modal Asing terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan", Prisma, No. 9,
thn. 1989
- Little, I.M.D., Clifford, J.M., International Aid, 1965
- Mariakasih, Frans Kho, "Praktek dan Teori Pembangunan Keter-
gantungan", Analisa, No. 9., tahun 1982.
- Meier, G.M., Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang, Teori
dan Kebijakanannya, Terj. oleh S. Si, a, ora, Bina
Aksara, Jakarta, 1985.
- Mosley, Paul, "Aid, Saving and Growth Reviested", Oxford
Bulletin of Economics and Statistic, Oxford Univ.
Press, Vol. 42, No. 2., May 1980.
- Mubyarto, "Pengkajian Ulang Strategi Pembangunan", Prisma,
No. 1, Januari 1988.
- Nurkse, Ragnar, Problem of Capital Formation in Under-
developed Countries, Basil Blackwell, 1953.

Panetto, Rachman, Ekspor, Perkembangan Industri, Kesempatan Kerja dan Perkembangan Perekonomian Indonesia,
Desertasi Doktor, Unhas, Ujung Pandang, 1987.

Posthumus, G.A., The Inter-Governmental Group on Indonesia,
Rotterdam University Press, 1971.

Prayitno, Hadi, Pengalaman Ekonomi Pembangunan, Edisi
Pertama, BPFE, UGMK Yogyakarta, 1986.

Singer, H.W., "External Aid: For Plans or Projects?",
Economic Journal, September 1965.

Sumber-sumber lain

Bulletin Statistik Bulanan, Indikator Ekonomi, BPS.

Laporan Mingguan Bank Indonesia.

Majalah Info Bank.

Buku Rencana Pembangunan Lima Tahun.

International Moneter Fund.

Dan lain-lain.

ORDER DATA FOR: B:HASAN-2 LABEL: REGRESI
 NUMBER OF CASES: 20 NUMBER OF VARIABLES: 4

REGRESI

VAR.:	NAME	MEAN	STD. DEV.
	Y	49.7473	50.2409
	F	1.8630	2.5613
	S	7.3260	9.7754
	I	10.9230	11.1050

DEPENDENT VARIABLE: I

	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 17)	PROB.	PARTIAL R ²
	.1776	.0192	9.261	.00000	.8346
CONSTANT	-.8722	.3762	2.318	.03314	.2402

STANDARD ERROR OF EST. = 1.9649

ADJUSTED R SQUARED = .9687

R SQUARED = .9720

MULTIPLE R = .9859

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	2277.4479	2	1138.7240	294.931	6.0000E-14
TOTAL	65.6368	17	3.8610		
RESIDUAL	2343.0848	19			

STANDARDIZED RESIDUALS

	OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
1	.315	1.032	-.7170	*
2	.455	1.140	-.6850	*
3	.580	1.245	-.6650	*
4	.857	1.540	-.6825	*
5	1.208	1.956	-.7483	*
6	1.797	2.356	-.5591	*
7	2.572	2.865	-.2933	*
8	3.205	3.370	-.6654	*
9	3.826	4.222	-.3961	*
10	4.671	5.348	-.6774	*
11	6.704	6.540	-.2363	*
12	9.485	8.860	.6253	*
13	11.553	10.937	.6164	*
14	17.407	15.707	3.6995	*
15	21.669	19.196	2.4726	*
16	20.136	18.551	1.5853	*
17	22.367	18.623	3.7436	*
18	24.782	29.498	-4.7157	*
19	30.980	31.061	-.0811	*
20	33.902	35.320	-1.4180	*

DUNN-WATSON TEST = 1.7216

ORDER DATA FOR: B:HASAN-2 LABEL: REGRES1
 NUMBER OF CASES: 20 NUMBER OF VARIABLES: 4

LAMPIRAN II

REGRES1

EX	NAME	MEAN	STD. DEV.
	I	10.9238	11.1056
	Y	49.7473	50.2409
	F	1.5688	2.5613
VAR.:	S	7.3260	4.2754

DEPENDENT VARIABLE: S

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 17)	PROB.	PARTIAL r ²
.1775	.0313	5.512	.00004	.6412
.0445	.6138	.072	.94311	3.00435E-04
CONSTANT	-1.3369			

STD. ERROR OF EST. = 3.2059

ADJUSTED R SQUARED = .8905

R SQUARED = .8931

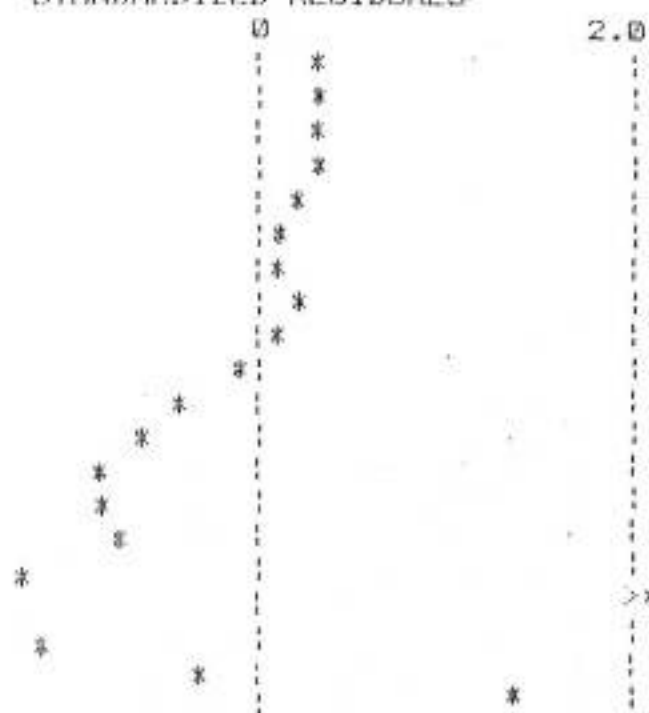
MULTIPLE R = .9450

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	1459.9000	2	729.9500	.71.024	5.570E-09
RESIDUAL	174.7196	17	10.2776		
TOTAL	1634.6276	19			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
.020	-.063	.8835
.099	-.773	.8720
.182	-.697	.0787
.306	-.536	.8419
.410	-.157	.5670
.899	.510	.3893
1.333	.852	.4813
1.905	1.365	.5404
2.205	1.965	.2398
2.387	2.014	-.4271
3.285	4.689	-1.4038
5.006	7.085	-2.0786
6.247	8.714	-2.4674
7.052	9.591	-2.5395
9.243	11.668	-2.4248
9.530	13.625	-4.0940
24.243	14.393	9.8495
19.115	22.682	-3.5661
22.670	23.538	-.8681
30.381	26.075	4.3059

STANDARDIZED RESIDUALS



SH-WATSON TEST = 2.3661

REGRESSION ANALYSIS

LAMPIRAN III

ORDER DATA FOR: D:HASAN-1 LABEL: REGRESI
 NUMBER OF CASES: 20 NUMBER OF VARIABLES: 3

REGRESI

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	F/Y	3.3330	2.2913
2	CLF	3.4350	2.1644
3	RY	6.4850	2.5192

DEPENDENT VARIABLE: RY

REGRESSION	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF= 17)	PROB.	PARTIAL R ²
Y	-.0567	.2643	-.215	.83259	.00000027
F	.3941	.2798	1.409	.17698	.031045
INSTANT	5.3205				

STD. ERROR OF EST. = 2.4856

ADJUSTED R SQUARED = .0266
 R SQUARED = .1290
 MULTIPLE R = .3592

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	15.5583	2	7.7791	1.259	.3091
RESIDUAL	105.0272	17	6.1781		
TOTAL	120.5855	19			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
1	7.600	5.651	1.9491
2	7.500	5.657	1.8434
3	7.000	5.634	1.3661
4	9.400	6.669	2.7314
5	11.300	6.686	4.6138
6	7.500	6.970	.6222
7	5.000	6.063	-1.0629
8	6.900	6.018	.8825
9	8.900	6.018	2.8825
10	7.700	7.098	.6024
11	6.300	7.155	-.8552
12	9.900	9.813	.0870
13	7.900	6.683	1.2173
14	2.300	6.524	-4.2235
15	4.200	6.201	-2.0005
16	5.800	6.129	-.3295
17	1.900	6.198	-4.2975
18	3.900	6.208	-2.3083
19	3.500	6.186	-2.6856
20	5.100	6.135	-1.0345

SHAPIRO-WILSON TEST = .9674

LAMPIRAN IV : Tabel t

df.	t_{100}	t_{050}	t_{025}	t_{010}	t_{005}	df.
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	4
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	6
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	15
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	17
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	18
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	19
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	20
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	21
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	22
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	23
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	24
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	25
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	26
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	27
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	28
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	29
inf	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	inf.

Sumber : John E. Freund & Frank J. Williams, *Modern Business Statistics*, edisi kedua, Prentice Hall, Inc., 1963.

LAMPIRAN V : TABEL F ($\alpha = 5\%$)

DERAJAT -- KEBEBASAN UNTUK PEMBILANG

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.20	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.78	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.67	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.30	2.96	2.81	2.70	2.61	2.53	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.94
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.04	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.20

Sumber: John E. Freund & Williams, *Modern Business Statistics*, edisi kedua, Prentice-Hall, Inc., 1965.

LAMPIRAN VI : TABEL F ($\alpha=1\%$)
TINGKAT KEBEBASAN UNTUK PEMBILANG

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4.052	5.000	5.403	5.625	5.764	5.859	5.928	5.982	6.023	6.056	6.106	6.157	6.209	6.235	6.261	6.287	6.313	6.339	6.364
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	8.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.94	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.19	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.93	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.53	2.45	2.36	2.27	2.17
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.64	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.92	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.93	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

407
Sumber: Frank J. Williams, *Modern Business Statistics*, edisi kedua, Prentice Hall, Inc., 1965.